



BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKMA

LAPORAN TAHUNAN 2024

PT BPR ARTHA SUKMA

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
I. Kepengurusan	1
II. Kepemilikan	6
III. Perkembangan Usaha BPR	7
IV. Strategi dan Kebijakan Manajemen	11
V. Laporan Manajemen	13
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	21
VII. Laporan Keuangan Tahunan	36
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	44
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	45

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2024 ini merupakan laporan lengkap yang memuat kinerja PT BPR Artha Sukma (Perseroda) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan Informasi Umum Bank. Laporan Keuangan yang dimuat dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi bagi BPR.

Tahun 2024, menjadi tahun yang sulit bagi perusahaan dan PT BPR Artha Sukma (Perseroda) tercermin dengan terdapat devisiasi kinerja keuangan. Seperti Total Aset mengalami devisiasi **10,09%**, Kredit Yang Diberikan (KYD) devisiasi sebesar **20,11%**, Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan mengalami Devisiasi **6,46%** dan Deposito mengalami peningkatan sebesar **6,35%**, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tumbuh **23,19%** menjadi sebesar **107,97%**. Sedangkan dari sisi Laba Tahun Berjalan terdapat peningkatan kerugian sebesar **19,57%** dibandingkan posisi tahun 2023. Dari sisi rasio kredit bermasalah (NPL), PT BPR Artha Sukma (Perseroda) meningkat menjadi **41,31%** per tanggal 31 Desember 2024. Angka rasio NPL tersebut mendapat perhatian khusus untuk dapat secara bertahap diturunkan ke level rasio NPL yang lebih sehat.

Merespon berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi, PT BPR Artha Sukma (Perseroda) mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bank dengan memperkuat penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko secara efektif serta mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*), inovasi dan efisiensi operasional serta kolaborasi yang efektif di setiap lini untuk meningkatkan kesiapan PT BPR Artha Sukma (Perseroda) dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan.

Semua langkah yang ditempuh memiliki tujuan untuk mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi menjadi peluang dan kesempatan baru yang dapat mendukung pertumbuhan dan peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang sekaligus memberikan nilai tambah kepada para *stakeholders* (pemangku kepentingan) PT BPR Artha Sukma (Perseroda).

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada kami dan menjalin kerjasama yang baik dengan PT BPR Artha Sukma (Perseroda).

I. Kepengurusan

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

1.	Nama	IDA RUMIANA
	Alamat	JL. SIMPEI KARUHEI IV NO.05
	Jabatan	Direktur Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	09 Oktober 2024
	Tanggal Selesai Menjabat	09 Oktober 2029
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEP-23/KO.0902/2023
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	07 Oktober 2024
	Pendidikan Terakhir	S2
	Tanggal Kelulusan	01 November 2021
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI KOMPETENSI DIREKTUR TINGKAT 1
	Tanggal Pelatihan	09 Agustus 2024
	Lembaga Penyelenggara	BNSP - PERBARINDO DKI JAKARTA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	09 Agustus 2027

2.	Nama	JOKO HARIYADI
	Alamat	JL. M. ALI BAHRUDIN RT 006 RW 000 KEL/DESA SUNGAI PASIR KEC PANTAI LUNCI KAB SUKAMARA
	Jabatan	Direktur Operasional YMF Kepatuhan
	Tanggal Mulai Menjabat	29 September 2023
	Tanggal Selesai Menjabat	29 September 2028
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEPR-1/KO.2301/2024
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	29 September 2023
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	09 Desember 2010
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS PALANGKARAYA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI KOMPETENSI DIREKTUR TINGKAT 1
	Tanggal Pelatihan	23 Januari 2019
	Lembaga Penyelenggara	BNSP - PERBARINDO DIY YOGYAKARTA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	23 Januari 2024

3.	Nama	PRIHATIN SURIANSYAH
	Alamat	JL. MEKAR DESA RT.02 RW 00 DESA NATAI SEDAWAK, KEC. SUKAMARA
	Jabatan	Komisaris
	Tanggal Mulai Menjabat	30 Desember 2024
	Tanggal Selesai Menjabat	30 Desember 2029
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEPR-3/KO.2301/2024
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	30 Desember 2024
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	11 April 1990
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	PELATIHAN SERTIFIKASI KOMISARIS
	Tanggal Pelatihan	20 September 2024
	Lembaga Penyelenggara	BNSP - PERBARINDO DIY YOGYAKARTA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	20 September 2027

2. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	FAUZANUDIN
	Alamat	JL. MAKMUR JALIL NO.76, RT/RW 013/000 KELURAHAN MENDAWAI, KECAMATAN SUKAMARA, KABUPATEN SUKAMARA
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Operasional
	Tanggal Mulai Menjabat	03 Desember 2024
	Surat Pengangkatan No.	52/800/Kep.DIR.BPR.AS/XII/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	03 Desember 2024
2.	Nama	MARSHA LESTARI AYU PRASASTY
	Alamat	JL. GARU RT/RW 014/004 KELURAHAN.MENDAWAI KECAMATAN SUKAMARA
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif APU dan PPT dan PPPSPM
	Tanggal Mulai Menjabat	03 Desember 2024
	Surat Pengangkatan No.	53/800/Kep.DIR.BPR.AS/XII/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	03 Desember 2024
3.	Nama	JENI LESMANI
	Alamat	JL AHMIDI RT 008 RW 003 KEL PADANG KEC SUKAMARA KAB SUKAMARA
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Marketing
	Tanggal Mulai Menjabat	03 Desember 2024
	Surat Pengangkatan No.	54/800/Kep.DIR.BPR.AS/XII/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	03 Desember 2024

4.	Nama	DIDIK SETIAWAN
	Alamat	TIRTOSARI 29B OURWONEGARAN RT/RW 003/006 KEL SRIWADERI KEC LAWEYAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Pimpinan Cabang
	Tanggal Mulai Menjabat	27 November 2023
	Surat Pengangkatan No.	054/800/Kep.DIR.AS/XI/2023
	Surat Pengangkatan Tanggal	27 November 2023
5.	Nama	RAMAWATI
	Alamat	JL. NELAYAN RT.02 RW.00 KEL.JELAI KEC. KUALA JELAI
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Tanggal Mulai Menjabat	27 Desember 2024
	Surat Pengangkatan No.	63/800/Kep.DIR.BPR.AS/XII/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	27 Desember 2024

II. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	PEMDA KABUPATEN SUKAMARA
	Alamat	JL. TJILIK RIWUT KM 07
	Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp40708164387
	Persentase Kepemilikan	99.75%
2.	Nama	PT. BANGUN SUKMA JAYA
	Alamat	JL. TJILIK RIWUT KM 08
	Jenis Pemilik	Badan Hukum
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp1000000000
	Persentase Kepemilikan	0.25%

Daftar Ultimate Shareholder

1.	Nama Ultimate Shareholder	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
----	---------------------------	--------------------------------------

III. Perkembangan Usaha BPR

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	10
Tanggal akta pendirian	10 September 2018
Tanggal mulai beroperasi	11 September 2018
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	05
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	31 Desember 2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-AH.01.03-0231112
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	31 Desember 2021
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Deposito dan Tabungan. Dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi.
Tempat kedudukan	Sukamara
Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	01. Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Pupung Heru Sriwulandaru, CPA

PT BPR Artha Sukma adalah sebuah lembaga Perbankan yang berkantor pusat di Jl. Pangeran Sukarma no 228 , saat ini telah mempunyai 1 (satu) Kantor Cabang yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM 17 Desa Bumi Harjo Kotawaringan Barat serta 2 (dua) kantor kas yang berlokasi di Jl. Kiai Gede RT 03 RW 01, Balai Riam dan Jl. Patimura, Kuala Jelai.

Sesuai dengan fungsinya keberadaan PT BPR Artha Sukma adalah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam upaya untuk turut serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	7.494.566
Beban Operasional	12.865.127
Pendapatan Non Operasional	16.270
Beban Non Operasional	109.207
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-5.463.499
Taksiran Pajak Penghasilan	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-5.463.499

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	319.266.556	-	-	-	-	319.266.556
Kredit yang Diberikan	286.920.682	-	25.826.897	14.527.629	39.547.436	403.545.263
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	286.920.682	-	25.826.897	14.527.629	39.547.436	403.545.263

Jumlah Aset Produktif	893.107.919	-	51.653.794	29.055.259	79.094.871	1.126.357.081
------------------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	107,97
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100
NPL Neto	20,60
NPL Gross	41,31
Return on Assets (ROA)	-8,03
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	171,67
Net Interest Margin (NIM)	7,88
Loan to Deposit Ratio (LDR)	171,29
Cash Ratio	55,28

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	41,31
NPL Neto (%)	20,60

Penyebab Utama Kondisi NPL:

Adapun penyebab utama NPL :

1. Penurunan omset usaha.
2. Etikat tidak baik.
3. Persaingan usaha.
4. Kurangnya kesadaran debitur akan komitmen pelunasan pada saat jatuh tempo.
5. Lemahnya prosedur Bank dalam menangani kredit Tanpa Angsuran (KTA) Kontruksi.
6. Lemahnya system pengikatan jaminan dikarenakan banyaknya debitur menggunakan jaminan berupa SKT (Surat Keterangan Tanah).

Langkah Penyelesaian:

Angka pencapaian NPL Gross pada Desember 2024 sebesar 41,31%. Angka NPL ini sangat menantang dan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah selama tahun 2024 masih belum maksimal dan memerlukan tindakan perbaikan dimulai dari perbaikan kolektibitas dan menjajaki penjualan agunan secara sukarela milik debitur yang bermasalah.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Selama tahun 2024 terjadi devisaasi yang cukup signifikan terutama pada pertumbuhan pendapatan operasional yang merupakan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya yang mencapai **15,92%** serta Beban operasional yang merupakan beban diluar beban bunga mencapai **1,91 %** juga devisaasi kredit mencapai **20,11%**.

Dalam perkembangan usaha Bank, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda), Pemerintah Kabupaten Sukamara berkomitmen menambah modal dasar dari yang semula Rp. 15.000.000.000,- menjadi 46.808.164.387,- berbentuk setoran uang tunai yang disetorkan secara bertahap selama 8 tahun dan inbreng berupa tanah dan bangunan.

Pada tahun 2024 Bank telah merealisasikan setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).

Kantor Cabang Sungai Rangit di Kabupaten Kotawaringin Barat yang beroperasi pertamakali pada tanggal 19 November 2018 telah membukukan Laba/Rugi sebesar ;

1. Tahun 2019 : Rp. 198.532.905,-
2. Tahun 2020 : Rp. 606.112.736,-
3. Tahun 2021 : Rp. 384.505.874,-
4. Tahun 2022 : Rp. 291.606.876,-
5. Tahun 2023 : (Rp. 3.616.927.437,-)
6. Tahun 2024 : (Rp. 2.214.766.949,-)

Perubahan Penting Lain

Sesuai Siaran Pers OJK Perihal Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 No SP-41/OJK/GKPB/III/2024 pada tanggal 31 Maret 2024, dimana terdapat perubahan status Relaksasi Covid-19 yang semula Lancar berubah menjadi Macet juga berdampak signifikan terhadap kenaikan Rasio NPL dan Pembentukan PPAP.

IV. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Kinerja PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh meliputi Pelayanan, Sistem dan peningkatan pengetahuan Sumber Daya manusia. Beberapa Strategi dan Kebijakan guna mewujudkan pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan aktivitas operasional selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan praktek terbaik dalam perbankan lain yang ditetapkan manajemen
2. Meningkatkan integritas, kemampuan, pengetahuan, kedisiplinan, Jujur dan berdedikasi tinggi kepada perusahaan serta mentaati aturan dan kode etik perusahaan
3. Pelayanan yang cepat, tepat dan memberikan nilai tambah kepada seluruh Nasabah
4. Meningkatkan kinerja secara tim yang solid serta menciptakan hubungan kekeluargaan yang kuat pada seluruh karyawan
5. Terus melakukan pengembangan sistem dan aplikasi serta perangkat keras dalam upaya untuk mengikuti cepatnya perkembangan teknologi informasi yang digitalisasi
6. Peningkatan efisiensi dalam segala aktifitas operasional dengan tidak mengurangi nilai pelayanan kepada nasabah dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

1. 1) Identifikasi

Untuk menentukan posisi Bank maka digunakan analisa SWOT. Pada tahun 2024 Bank merumuskan berada di **Kuadran III (negatif, positif)** pada diagram analisa SWOT. Posisi ini menandakan sebuah organisasi memiliki peluang yang sangat besar berhadapan dengan kelemahan internal yang kuat. Strategi yang dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal untuk merebut peluang yang ada. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak pelatihan dan/atau kompetensi Karyawan.

Dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pada tahun 2024, Bank terfokus pada kekosongan pengurus (Direktur Utama dan Komisaris), Rekrutmen kepengurusan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 untuk jabatan Direktur Utama serta aktif secara operasional pada tanggal 09 Oktober 2024 dan bulan Oktober 2024 untuk jabatan Komisaris serta aktif secara operasional pada tanggal 02 Januari 2025.

Komisaris Utama mengundurkan diri pada bulan Agustus 2024 dikarenakan yang bersangkutan menjadi PJ Kepala Daerah dikarenakan hal tersebut yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan.

Jumlah Dewan Komisaris saat ini berjumlah 1 (satu) orang dan Direksi 2 (dua) orang. Berdasarkan POJK Nomor 09 Tahun 2024, Bank terdapat kekosongan Komisaris Utama pada periode 2024.

2) Pengukuran

Dalam hal pengukuran penanganan kredit bermasalah beberapa hal yang telah dilakukan

Bank, adalah :

1. Peningkatan outstanding kredit sesuai Rencana Bisnis Bank.
2. Mengklasifikasikan penanganan kredit bermasalah berdasarkan tingkat kemungkinan tertagih.
3. Mengklasifikasikan penanganan kredit bermasalah berdasarkan agunan yang dijaminan pada bank, baik berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan/atau Penjualan Agunan.

3) Pemantauan

Kegiatan pemantauan Bank tentunya mengutamakan fungsi kepatuhan dan audit internal untuk mengidentifikasi dan mengukur kepatuhan maupun kinerja seluruh aktifitas Bank. Dalam hal pemantauan beberapa hal yang telah dilakukan Bank, adalah :

1. Pengawasan dalam kinerja pencapaian target Rencana Bisnis Bank setiap bulan.
2. Turut berperan dalam hal kelengkapan administratif AYDA maupun penjualan agunan.

4) Pengendalian Risiko

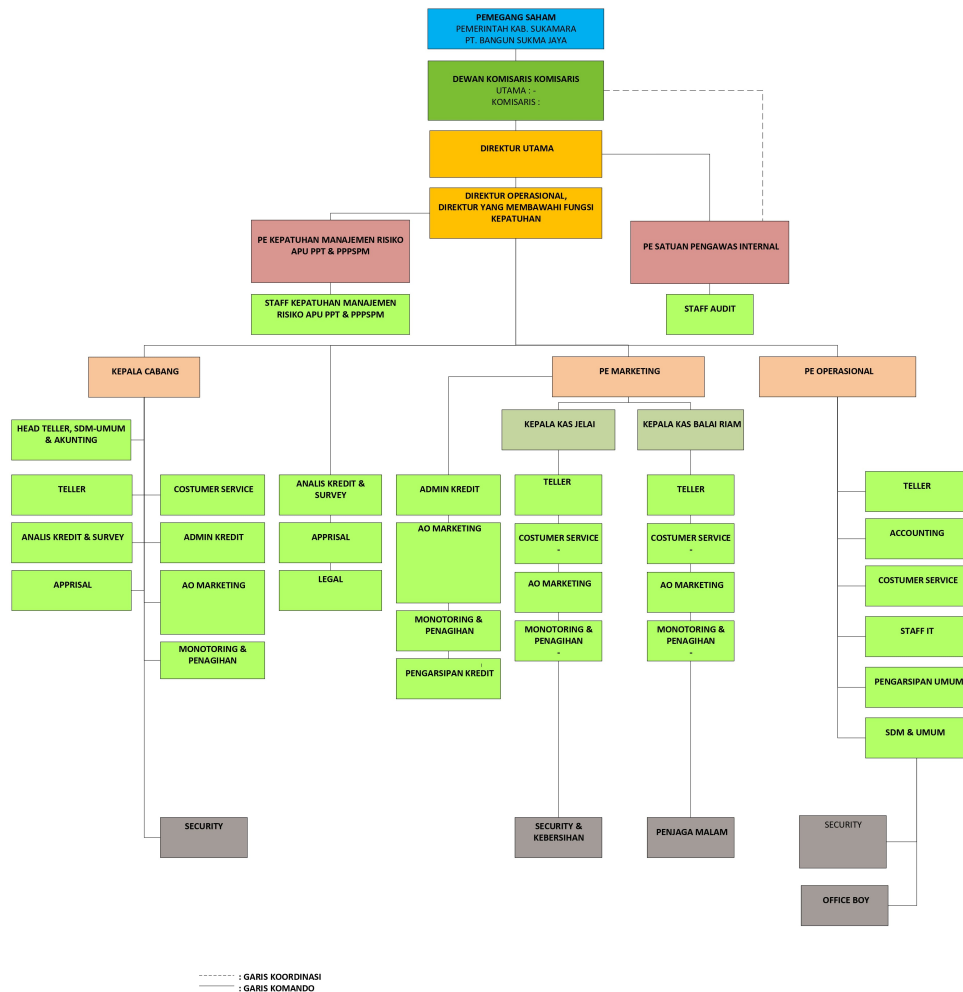
Dalam hal pengendalian Risiko beberapa hal yang telah dilakukan Bank, adalah :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pengawasan Audit Internal dan PE Kepatuhan.
3. Penerapan Standar Prosedur Operasional.

V. Laporan Manajemen

1. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi



Penjelasan Struktur Organisasi

Jumlah Dewan Komisaris saat ini berjumlah 1 orang dan Direksi berjumlah 2 orang. Berdasarkan POJK Tata Kelola Nomor 09 Tahun 2024, Bank terdapat kekosongan Komisaris Utama pada periode 2024.

Dalam menjalankan tugasnya telah mencerminkan penerapan Tata kelola yang baik antara lain:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
3. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
7. Keputusan- keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui .

2. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS

1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan Sukma
	Uraian	Salah satu tabungan yang disediakan oleh PT BPR Artha Sukma (Persero) dengan bunga 3%/ tahun.
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan Siswa
	Uraian	Tabungan Siswa adalah suatu bentuk simpanan uang yang dimiliki oleh Siswa atau pelajar sebagai sarana untuk menanamkan kebiasaan menabung sejak dini dengan

		tujuan untuk mendidik siswa tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijak.
3.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito
	Uraian	Deposito adalah simpanan berjangka di BPR Artha Sukma yang hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu tertentu dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
4.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Investasi
	Uraian	Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada Nasabah untuk membiayai kegiatan investasi jangka menengah atau panjang. Tujuan utama dari kredit ini adalah untuk membiayai pembelian barang modal, pengembangan usaha, pembangunan fasilitas produksi, atau proyek- proyek lain yang bersifat produktif.
5.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Konsumtif
	Uraian	Fasilitas kredit yang diberikan kepada golongan berpenghasilan tetap seperti PNS dan Karyawan Perusahaan baik perorangan maupun secara kolektif.
6.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Modal Kerja
	Uraian	Fasilitas kredit yang ditujukan untuk pengembangan usaha debitur dengan cara menambah usaha debitur dengan cara menambah modal kerja melalui peningkatan persediaan dan piutang, pada semua sektor.

7.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Tanpa Angsuran
	Uraian	Failitas kredit yang diberikan nasabah bersifat tanpa angsuran, debitur hanya membayar angsuran bunga, pokoknya dapat dilunasi sekaligus pada saat jatuh tempo.
8.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Kendaraan dan Barang Elektronik
	Uraian	Fasilitas Kredit yang ditujukan untuk keperluan konsumtif kendaraan dan elektronik. Pinjaman kredit di masyarakat umum seperti pelaku usaha, pegawai negeri, karyawan kontrak pemerintahan, karyawan swasta dan karyawan wiraswasta.
9.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit KURDA Sukma
	Uraian	KURDA SUKMA atau Kredit Usaha Rakyat Daerah Sukamara merupakan pembiayaan/ kredit atau layanan pinjaman bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Sukamara dengan bunga rendah kepada UMKM yang memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman 3% per/ tahun.
10.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Tenaga Kerja Kontrak,Karyawan BUMD dan PPPK
	Uraian	Fasilitas kredit yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja (biasanya di instansi pemerintah atau swasta).

11.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Perumahan Non Subsidi
	Uraian	Kredit Perumahan yang ditujukan untuk keperluan konsumtif di masyarakat umum seperti pelaku usaha, pegawai negeri, karyawan kontrak pemerintahan, karyawan swasta dan karyawan wiraswasta.

3. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan , PPATK , Perpajakan dan LPS , kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting:

1. Sistem Operasional
 - a. Sistem operasional menggunakan Core Banking Bank bekerja sama dengan vendor PT USSI
 - b. Sistem Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan meliputi :
 - Sipeduli untuk pengaduan Nasabah, Self Assesment, edukasi dan Inklusi
 - SLIK untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan
 - APOLO untuk pelaporan kepada OJK
 - Sigap untuk pelaporan APU PPT
 - c. Sistem Aplikasi Sipesat dan GOAML untuk PPATK
2. Sistem Keamanan
 - a. Untuk keamanan Data server ditempatkan diruangan khusus berpendingin udara yang hanya bisa diakses oleh pejabat yang ditunjuk.
 - b. Secara rutin dilakukan *Back up* data *Mirroring* dan *back up* data pada *harddisk* eksternal yang disimpan diruang khasanah.
3. Penyedia Jasa Informasi Keuangan
 - a. Creva Business Consulting untuk aplikasi Core Banking Go Digital

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Pada tanggal 06 Agustus 2019 Bank dapat merealisasikan aplikasi IBS Branchless dimana aplikasi pendukung transaksi sistem jemput bola yang dilakukan oleh marketing dana. Hal ini juga salah satu wujud dari mitigasi risiko penghimpunan dana. Penggunaan aplikasi IBS Branchelss digunakan di seluruh jaringan Kantor, yaitu :

1. Kantor Pusat : 3 User IBS Branchless
2. Kantor Cabang : 1 User IBS Branchless
3. Kantor Kas Balai Riam : 1 User IBS Branchless
4. Kantor Kas Kuala Jelai : 1 User IBS Branchless

4. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Guna mendukung rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis harus didukung adanya suatu target yang terukur dan target pasar yang jelas . langkah langkah untuk pengembangan target pasar dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan jumlah nasabah dari beberapa wilayah yang selama ini sudah menjadi pasar BPR.
2. Memperluas wilayah pemasaran baru disekitar wilayah yang sudah ada.
3. Target pengembangan usaha dengan mencari peluang sektor ekonomi potensial yang ada diwilayah kerja

5. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor

1.	Nama Kantor	PT. BPR ARTHA SUKMA
	Alamat	JALAN PANGERAN SUKARMA NO 228
	Desa/Kecamatan	MENDAWAI SUKAMARA
	Kabupaten/Kota	Kab. Sukamara
	Kode Pos	74712
	Nama Pimpinan	IDA RUMIANA
	Nomor Telepon	(0532)268 72
	Jumlah Kantor Kas	2
2.	Nama Kantor	PT. BPR ARTHA SUKMA CAB SUNGAI RANGIT
	Alamat	JL. AHMAD YANI KM 17
	Desa/Kecamatan	KUMAI
	Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat
	Kode Pos	74181
	Nama Pimpinan	DIDIK SETIAWAN
	Nomor Telepon	(0823)354 2766

Jumlah Kantor Kas	0
-------------------	---

6. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Notaris ARPIANSYAH., SH.M.Kn
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	30 Januari 2012
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Notariel
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian kerjasama dibidang Notariel akta dan akta PPAT
2.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. USSI Pinbuk Prima Software
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	07 Mei 2013
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerjasama Penyedia Core Banking Sistem
3.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. Jamkrida
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	14 Agustus 2014
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerjasama Jasa Penjaminan Asuransi Kredit
4.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. Askrindo
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	14 Mei 2017
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerjasama penyedia Jasa Asuransi Kendaraan Dinas

5.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BANK KALTENG
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	22 September 2017
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama antara PT BPR Artha Sukma (Perseroda) Kabupaten Sukamara dengan PT Bank Kalteng Cabang Sukamara tentang Pemotongan Angsuran kredit Pegawai Negeri Sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
6.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	GATOT SUPARTONO
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	15 Januari 2018
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama penyedia Teknisi Teknologi Informasi
7.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. Asuransi Bangun Askrida
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	21 Maret 2018
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama penyedia jasa asuransi Gedung kantor dan Khasanah
8.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PDAM Sukamara
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	30 April 2018
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama transaksi pembayaran tagihan rekening air pelanggan PDAM Kabupaten Sukamara

9.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	20 September 2019
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau asuransi jiwa
10.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Komunal Sejahtera
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	23 Maret 2022
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Penempatan Dana Berbasis Teknologi Informasi (Deposit Channeling) Dan Penyaluran Pinjaman
11.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Kawan Cicil Teknologi Utama
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	26 Oktober 2022
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Induk Penunjukan Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan Dan Pemberi Dana
12.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT DUHA MADANI SYARIAH
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	08 Agustus 2023
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Bilateral
	Uraian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Penyaluran P2P Lending.

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor	
Jumlah Pegawai Pemasaran	15 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	12 orang
Jumlah Pegawai Lainnya	17 orang
Jumlah Pegawai Tetap	19 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	25 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	12 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	17 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	30 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	14 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	12 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	25 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	3 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	4 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	0 orang

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS		
1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Manajemen Risiko

		dan Tingkat Kesehatan Bank
	Tanggal Pelaksanaan	08 Januari 2024
	Jumlah Peserta	50 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank pada OJK.
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Perubahan Pelaporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank
	Tanggal Pelaksanaan	24 Januari 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	OJK menyelenggarakan webinar mengenai perubahan pelaporan profil risiko dan tingkat kesehatan bank. Webinar ini membahas perubahan dalam sistem pelaporan yang dilakukan OJK untuk memastikan BPR di Indonesia memiliki profil risiko yang sehat dan tingkat kesehatan yang baik.
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Strategi Pengelolaan Investasi dan Industri Perasuransian Dana Pensiun
	Tanggal Pelaksanaan	05 Februari 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK "Strategi Pengelolaan Investasi dan Industri Perasuransian Dana Pensiun" membahas strategi pengelolaan investasi di industri perasuransian dan dana pensiun, serta peranan OJK dalam mengawasi dan mengatur sektor ini.

4.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Penyegaran dan Survaillen Direktur
	Tanggal Pelaksanaan	13 Februari 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Acara yang diselenggarakan oleh PERBARINDO DIY untuk Serifikasi Lanjutan Komisaris dan Direktur Tk.1
5.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar PPATK Koordinasi Penginaan Aplikasi SIPENDAR
	Tanggal Pelaksanaan	22 Februari 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar PPATK tentang koordinasi penggunaan aplikasi SIPENDAR bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan aplikasi ini dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Webinar ini akan membahas mekanisme kerja SIPENDAR, termasuk bagaimana penyedia jasa keuangan dapat melaporkan transaksi mencurigakan dan bagaimana PPATK memproses informasi tersebut.
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Menentukan Suku Bunga Kredit (BLR dan SBDK) Fool Of Fund dan Asset Allocation
	Tanggal Pelaksanaan	27 Februari 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK tentang menentukan suku bunga kredit biasanya membahas berbagai aspek yang terkait dengan suku bunga, termasuk suku bunga acuan BI, SBDK, dan

		faktor-faktor yang memengaruhi suku bunga kredit. Webinar ini juga mungkin membahas bagaimana OJK mengatur dan mengawasi suku bunga kredit, terutama dalam konteks pinjaman online.
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Kajian Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata Serta Hukum Pidana
	Tanggal Pelaksanaan	28 Februari 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK tentang kajian hutang-piutang, terutama terkait pinjaman online (pinjol), membahas berbagai aspek terkait pengelolaan dan penagihan utang oleh penyelenggara pinjol. OJK memiliki aturan ketat untuk melindungi konsumen pinjol dari penagihan yang tidak wajar, seperti ancaman, teror, atau intimidasi. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa pinjol beroperasi dengan bertanggung jawab dan melindungi hak-hak konsumen.
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan USSI Implementasi SAK EP
	Tanggal Pelaksanaan	05 April 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan USSI Implementasi SAK EP adalah pelatihan yang dirancang untuk membantu peserta memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP)
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Menyusun Laporan IRA dan Implementasi APU PPT P2SPM Pada BPR dan BPRS sesuai POJK 08 Tahun 2023
	Tanggal Pelaksanaan	19 April 2024

	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK mengenai penyusunan Laporan IRA (Individual Risk Assessment) dan implementasi APU (Anti Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), dan PPPSPM (Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) pada BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) akan membahas ketentuan dalam POJK No. 8 Tahun 2023. Webinar ini akan fokus pada pemahaman dan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan, khususnya bagi BPR dan BPRS, serta bagaimana menyusun laporan IRA yang tepat sesuai dengan regulasi.
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Workshop Digital Marketing
	Tanggal Pelaksanaan	05 Mei 2024
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sobat OJK, perkembangan teknologi dan kondisi pandemi saat ini, mendorong industri jasa keuangan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen melalui platform digital. Namun di sisi lain, maraknya pengaduan masyarakat di sektor jasa keuangan menunjukkan bahwa masih banyak pengguna produk keuangan di Indonesia yang belum memahami produk dan layanan keuangan secara efektif.
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Sosialisasi Uji Coba Server SLIK Tahap III Eksternal
	Tanggal Pelaksanaan	20 Mei 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR

	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK tentang sosialisasi uji coba server SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Tahap III Eksternal bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai uji coba server SLIK yang sedang berlangsung. SLIK adalah sistem informasi yang dikelola OJK untuk mendukung pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Self Assesment IRA APU PPT dan PPPSPM
	Tanggal Pelaksanaan	13 April 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan Self Assesment IRA APU PPT dan PPPSPM pada OJK.
13.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Komisaris dan Direktur
	Tanggal Pelaksanaan	19 Juni 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Acara yang diselenggarakan oleh PERBARINDO DKI Jakarta untuk Serifikasi Lanjutan Komisaris dan Direktur Tk.1
14.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Perubakan POJK 09 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	20 Juni 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif

	Uraian Kegiatan	Webinar OJK mengenai perubahan POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS bertujuan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan perubahan regulasi terkait tata kelola di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk persyaratan independensi komisaris, kewajiban laporan tata kelola, dan pencabutan ketentuan sebelumnya.
15.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Sosialisasi Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi Inklusi BPR dan BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	27 Juni 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaporan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Webinar ini akan menjelaskan pentingnya pelaporan tersebut dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
16.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Sosialisasi Penilaian Sendiri Laporan Pelindungan Nasabah dan Pengaduan Konsumen
	Tanggal Pelaksanaan	17 Juli 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	PUJK melakukan Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan menyampaikan laporan hasil

		Penilaian Sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan
17.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penilaian Jaminan
	Tanggal Pelaksanaan	02 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	DPK Kalteng membuat Pelatihan seluruh BPR dan BPRS terkait Marketing Kredit.
18.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Pelaporan Aplikasi Digital SIPPENA Penyampaian Lpaoran Self Assesment Edukasi dan Pelindungan Nasabah
	Tanggal Pelaksanaan	27 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan Self Assesment Self Assesment Edukasi dan Pelindungan Nasabah pada OJK.
19.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Pemaparan Struktur Data Laporan Berkala Bulanan BPR dan BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	26 September 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

		Nomor 33/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101/ OJK) yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
20.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Pelaporan Rencana Bisnis Bank
	Tanggal Pelaksanaan	04 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan SIRENBIS Rencana Bisnis Bank pada OJK.
21.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Retail Credit Risk Division Analisa Debitur Fixed Income
	Tanggal Pelaksanaan	04 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK mengenai Risiko Kredit di bidang Retail dan Implementasinya terhadap Analisa Kredit.
22.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar LPS Sosialisasi Penyampaian Perhitungan dan Pembayaran Premi LPS
	Tanggal Pelaksanaan	10 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Webinar LPS yang bertema sosialisasi penyampaian perhitungan dan pembayaran premi LPS merupakan acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin

		Simpanan (LPS) untuk memberikan edukasi kepada bank peserta mengenai tata cara perhitungan premi dan pembayaran premi kepada LPS
23.	Nama Kegiatan Pengembangan	PELATIHAN PENGGUNAAN TOOLS SAK EP
	Tanggal Pelaksanaan	10 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	PT USSI sebagai vendor core banking sistem Bank mengadakan kegiatan pelatihan softskills guna menunjang persiapan SAK EP pada tahun 2025.
24.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Pengawasan, Penyelamatan dan Penyelesaian Tunggakan dan Kredit Bermasalah
	Tanggal Pelaksanaan	15 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai pengawasan, penyelamatan, dan penyelesaian tunggakan serta kredit bermasalah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi terkait penanganan masalah keuangan di sektor jasa keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya. Webinar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan yang dilakukan OJK terhadap lembaga keuangan, hingga mekanisme penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
25.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Web APOLO Modul untuk Laporan Profesi Keuangan Akuntan Publik
	Tanggal Pelaksanaan	23 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	2 orang

	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Tujuan webinar sosialisasi Web APOLO oleh OJK adalah untuk mengedukasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tentang penggunaan sistem pelaporan online APOLO. Hal ini bertujuan agar LJK dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara efektif dan efisien.
26.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Aplikasi Digital SI-INSAF
	Tanggal Pelaksanaan	28 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan Strategi Anti Fraud pada OJK.
27.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK Web APOLO Modul untuk Laporan Strategi Anti Fraud
	Tanggal Pelaksanaan	29 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	ujuan utama webinar OJK tentang Web APOLO Modul untuk Laporan Strategi Anti Fraud adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menerapkan dan melapor strategi anti fraud yang efektif. Webinar ini akan memberikan informasi tentang regulasi anti fraud OJK, tantangan dan peluang dalam industri keuangan, serta bagaimana menggunakan teknologi seperti AI untuk mendukung strategi anti fraud.
28.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar OJK RPOJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan dan Laporan Integritas

		Pelaporan Keuangan Bank
	Tanggal Pelaksanaan	08 November 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Tujuan webinar OJK mengenai RPOJK Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan dan Laporan Integritas Pelaporan Keuangan Bank adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada peserta terkait regulasi baru tersebut. Webinar ini bertujuan untuk memastikan bahwa industri perbankan memahami dan dapat mengimplementasikan aturan- aturan baru tersebut secara efektif.
29.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Aplikasi Digital SI RKAB
	Tanggal Pelaksanaan	12 November 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada OJK.
30.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Kepegawaian dan Jobdesk Karyawan PT BPR Artha Sukma (Perseroda)
	Tanggal Pelaksanaan	13 November 2024
	Jumlah Peserta	45 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Kegiatan Internal untuk sosialisasikan SOP Kepegawaian yang baru dalam menunjang pengetahuan Karyawan mengenai Peraturan Kepagawaian Bank.

31.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Strategi Kredit Berkualitas Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan PT BPR Artha Sukma (Perseroda)
	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2024
	Jumlah Peserta	40 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Kegiatan Internal dalam Strategi Kredit Berkualitas untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dalam memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta mengenai analisis kredit yang berkelanjutan, pengelolaan risiko, dan praktik terbaik dalam memberikan kredit yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan
32.	Nama Kegiatan Pengembangan	Motivasi dan Disiplin Kunci Sukses 2025
	Tanggal Pelaksanaan	12 April 2025
	Jumlah Peserta	20 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	DPK Kalteng mengadakan pelatihan motivasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri, menetapkan tujuan, dan mencapai hasil yang diinginkan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi intrinsik (dari dalam diri) dan ekstrinsik (dari luar) serta membantu peserta mengembangkan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan.
33.	Nama Kegiatan Pengembangan	Creva Pelatihan Hardskill Aplikasi Digital SIP TAKOL
	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2024
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif

Uraian Kegiatan	Pelatihan yang diadakan oleh Creva Business Consulting sebagai penunjang pelaporan Tata Kelola pada OJK.
-----------------	--

VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023
Kas dalam Rupiah	1.355.193	1.044.875
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	22.837.282	14.108.949
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	44.895	34.485
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	48.406.054	60.587.705
Provisi yang belum diamortisasi	298.045	417.571
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	0	0
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	10.294.612	6.459.677
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	1.437.525	1.676.023
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	4.063.240	3.968.400
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	1.851.344	1.644.875
Aset Tidak Berwujud	447.717	442.717
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	309.657	248.244
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	542.460	705.651

TOTAL ASET	66.290.919	73.729.469
Liabilitas Segera	125.062	154.978
Tabungan	13.916.016	14.877.792
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0
Deposito	14.344.099	13.487.421
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	1.656.014	7.442.527
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	383.727	437.252
TOTAL LIABILITAS	30.424.919	36.399.970
Modal Dasar	46.808.164	46.808.164
Modal yang Belum Disetor -/-	6.000.000	10.000.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan	0	0
Umum	5.090.632	5.090.632
Tujuan	0	0
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	-4.569.297	0
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-5.463.499	-4.569.297
TOTAL EKUITAS	35.866.000	37.329.499

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023
Pendapatan Operasional	7.494.566	8.726.096
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
Surat Berharga	0	0
Giro	66.286	142.564
Tabungan	83.551	21.941
Deposito	385.929	272.611
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	6.114.874	6.776.968
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	367.912	327.318
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	22.893	49.819
e. Pemulihan CKPN	214.541	871.570
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

k. Lainnya	238.579	263.304
Beban Operasional	12.865.127	13.182.220
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	373.924	395.847
Deposito	800.336	783.706
Simpanan dari Bank Lain	258.847	343.913
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	62.016	67.431
b. Biaya Transaksi		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	55.613	51.230
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0
d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	6.815.083	6.570.785
e. Penyertaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	0	0
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	2.490.862	2.367.242
Honorarium	186.274	269.414
Lainnya	292.367	618.509
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	240.000	205.549
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	55.500	55.500
Lainnya	0	0

d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	206.469	186.291
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	61.412	51.177
f. Beban Premi Asuransi	214.298	219.335
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	98.341	120.970
h. Beban Barang dan Jasa	520.560	606.028
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	43.800	45.004
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	89.425	224.289
Laba (Rugi) Operasional	-5.370.561	-4.456.124
Pendapatan Non Operasional	16.270	2.155
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	16.270	2.155
Beban Non Operasional	109.207	115.328
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	109.207	115.328
Laba (Rugi) Non Operasional	-92.937	-113.173

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	-5.463.499	-4.569.297
Taksiran Pajak Penghasilan	0	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-5.463.499	-4.569.297
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2024	Posisi 2023
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	2.984.555	2.292.316
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0

b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	3.806.765	1.018.349
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	0	0
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan

Saldo per 31 Des Tahun 2022

Dividen
 Pembentukan Cadangan
 DSM Ekuitas
 Laba/Rugi yang Belum Direalisasi
 Revaluasi Aset 2024etap
 Laba/Rugi Periode Berjalan
 Pos Penambah/Pengurang Lainnya

Saldo per 31 Des Tahun 2023

Dividen
 Pembentukan Cadangan
 DSM Ekuitas
 Laba/Rugi yang Belum Direalisasi
 Revaluasi Aset 2024etap
 Laba/Rugi Periode Berjalan
 Pos Penambah/Pengurang Lainnya

Saldo Akhir (per 31 Des)

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Saldo 2024	Saldo 2023
Penerimaan pendapatan bunga	7.018.552	7.541.403
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	0	0
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	498.907	1.234.513
Pendapatan operasional lainnya	476.014	1.184.693
Pembayaran beban bunga	4.283.423	4.159.239
Beban gaji dan tunjangan	3.209.503	3.460.713
Beban umum dan administrasi	8.071.077	7.906.319
Beban operasional lainnya	89.425	224.289
Pendapatan non operasional lainnya	16.270	2.155
Beban non operasional lainnya	109.207	115.328
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penempatan pada bank lain	22.837.282	14.108.949
Kredit yang diberikan	48.108.009	60.170.135
Agunan yang diambil alih	1.437.525	1.676.023
Aset lain-lain	542.460	705.651
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Liabilitas segera	125.062	154.478
Tabungan	43.671.255	44.833.903
Deposito	42.818.513	42.071.968
Simpanan dari bank lain	1.656.014	7.442.527
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	15.914.208	14.167.712
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas netto dari aktivitas operasi	200.882.706	211.159.999
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	0	0
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas netto dari aktivitas Investasi	0	0

Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	572.779	597.195
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	572.779	597.195
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	201.455.485	211.757.194
Kas dan setara Kas awal periode	0	0
Kas dan setara Kas akhir periode	201.455.485	211.757.194

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Laporan Tahunan kami sampaikan sesuai dengan data hasil pemeriksaan Auditor Independent Akuntan Publik Pupung Heru Sriwulandaru, CPA dan Rekan nomor. **00125/2.1353/AU.2/07/1439-1/1/ III/2025** yang diterbitkan tanggal 25 Maret 2025 dengan opini Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara **wajar tanpa pengecualian** dalam semua hal yang material, Posisi keuangan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) per tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia. Laporan Akuntan Publik tersedia pada lampiran Laporan Tahunan ini.

**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2024
PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : IDA RUMIANA
Alamat Kantor : JALAN PANGERAN SUKARMA NO 228
Alamat Domisili : JALAN SIMPEI KARUHEI NO 5 KELURAHAN PALANGKA KECAMATAN
PALANGKARAYA
Nomor Telepon : 085225252588
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
2. Nama : JOKO HARIYADI
Alamat Kantor : JALAN PANGERAN SUKARMA NO 228
Alamat Domisili : JALAN M.ALI NAHRUDIN RT/RW 005/000 KELURAHAN SUNGAI
PASIR KECAMATAN PANTAI LUNCI
Nomor Telepon : 082251143221
Jabatan : DIREKTUR OPRASIONAL YMH KEPATUHAN

Menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA) telah disusun untuk tahun buku 2024 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA) Tahun Buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA) tahun buku 2024 sesuai POJK mengenai integritas pelaporan keuangan Bank,
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukamara, 05 Mei 2025

PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA)


PT. BPR ARTHA SUKMA
KANTOR PUSAT
SUKAMARA
IDA RUMIANA
DIREKTUR UTAMA


JOKO HARIYADI
DIREKTUR OPRASIONAL YMH KEPATUHAN

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2024
PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA) tahun 2024 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukamara, 05 Mei 2025

PT BPR ARTHA SUKMA (PERSERODA)



Ida Ruriana
Direktur Utama

Menyetujui,


Joko Hraiyadi

Direktur Operasional YMF Kepatuhan

Mengetahui,



Prihatin Suriansyah
Komisaris

LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
Dan
Laporan Audit Independen

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang Tanggungjawab atas Laporan Keuangan PT BPR Artha Sukma (Perseroda)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024..... i

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN..... ii-iii

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Neraca..... 1
Laporan Laba Rugi..... 3
Laporan Perubahan Ekuitas..... 4
Laporan Arus Kas..... 5
Catatan Atas Laporan Keuangan..... 6-32

Lampiran :

Lampiran I (Tingkat Kesehatan Bank) 31 Desember 2023



BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKMA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | Ida Rumiana |
| Alamat kantor | : | Jl. Pangeran Sukarma No. 228
Sukamara, Kalimantan Tengah |
| Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain | : | Jl. Simpei Karuhei IV No. 05 RT RW
006 025 Kel. Palangka Kec. Jekan raya
Kota palangka Raya |
| Nomor Telepon | : | 0852-2525-2588 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA);
2. Laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA) telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA).

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukamara, Kalimantan Tengah, 25 Maret 2025





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00125/2.1353/AU.2/07/1439-1/1/III/2025

Kepada yang terhormat,

PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA)

di-

Jl. Pangeran Sukarma No. 228 Sukamara, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (PERSERODA)** selanjutnya disebut (“Perusahaan”) yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2024 dengan nomor opini 00037/3.0420/AU.2/07/0388-1/1/II/2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan pengguna basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi-transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RONI PUPUNG**

Izin Usaha : KMK RI No. 1258/KM.1/2021

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RONI PUPUNG**

Pupung Heru Sriwulandaru, CPA
NRAP AP.1439

Jakarta, 25 Maret 2025



PT BANK PEKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.c., 3.	1.355.192.700	1.044.874.900
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	2.d., 4.	337.887.777	464.820.412
Penempatan Pada Bank Lain			
<i>Setelah dikurangi penyisihan kerugian per 31 Desember 2024 sebesar Rp.44.895.336,- dan 2023 sebesar Rp.34.484.882,-</i>	2.g., 5.	22.792.386.685	14.074.464.468
Kredit yang Diberikan			
<i>Setelah dikurangi penyisihan penghapusan kredit per 31 Desember 2024 sebesar Rp.10.294.612.178,- dan 2023 sebesar Rp.6.459.677.236,-</i>	2.f., 6.	37.813.397.239	53.710.457.300
Agunan yang diambil Alih	2.h., 7.	1.437.525.000	1.676.023.000
JUMLAH ASET LANCAR		63.736.389.401	70.970.640.080
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
<i>Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.851.343.830,- dan 2023 sebesar Rp.1.644.874.719,-</i>	2.i., 8.	2.211.896.583	2.323.525.694
Aset Tidak Berwujud			
<i>Setelah dikurangi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp.309.656.616,- dan 2023 sebesar Rp.248.244.120,-</i>	2.i., 9.	138.060.428	194.472.924
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		2.349.957.011	2.517.998.618
Aset Lain - Lain	2.k.,10	204.572.300	240.830.209
JUMLAH ASET		66.290.918.712	73.729.468.907

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Segera	<i>2.l.,11</i>	125.062.142	154.977.858
Utang Bunga	<i>2.m.,12</i>	33.600.948	40.270.792
Simpanan	<i>2.n.,14</i>	28.260.115.527	28.365.213.086
Simpanan Dari Bank Lain	<i>2.n.,15</i>	1.656.013.532	7.442.526.700
Sub Jumlah		30.074.792.149	36.002.988.436
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Sub Jumlah		-	-
Kewajiban Lain-lain	<i>2.r.,16</i>	350.126.430	396.981.675
JUMLAH KEWAJIBAN		30.424.918.579	36.399.970.111
EKUITAS			
<i>Modal dasar - 46.809 lembar saham, dengan 2 jenis klasifikasi saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,- dan Seri B dengan nilai nominal Rp.164.387. Modal ditempatkan dan setor sejumlah 40.809 lembar saham, Seri A sebanyak 40.808 lembar saham dan Seri B 1 lembar saham.</i>			
	<i>2.t.,17</i>	40.808.164.387	36.808.164.387
Cadanga Umum	<i>2.t.,18</i>	5.090.631.693	5.090.631.693
Rugi Tahun Lalu		(4.569.297.283)	-
Rugi Tahun Berjalan	<i>2.t.,19</i>	(5.463.498.663)	(4.569.297.284)
JUMLAH EKUITAS		35.866.000.133	37.329.498.796
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		66.290.918.712	73.729.468.907

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**ARTHA SUKMA (PERSERODA)****LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	2.v.,20		
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual		535.765.918	437.116.166
Provisi		180.207.515	151.638.347
Bunga Dari Pihak Ketiga		6.114.873.920	6.776.968.107
Administrasi Kredit		187.704.789	175.680.060
Sub Jumlah		7.018.552.141	7.541.402.680
Beban Bunga	2.x.,22	(1.495.123.378)	(1.590.897.741)
Pendapatan Bunga Neto		5.523.428.763	5.950.504.939
Pendapatan Operasional Lainnya	2.v.,21	476.013.772	1.184.693.237
JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		5.999.442.535	7.135.198.176
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Kerugian / Penyusutan:	2.x.,23		
Beban Penyisihan Aset Produktif		(6.870.695.412)	(6.622.014.817)
Beban Penyusutan Aset Tetap		-	(186.290.597)
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud		-	(51.177.080)
Beban Administrasi dan Umum	2.x.,24	(4.409.883.925)	(4.507.550.141)
Beban Operasional Lainnya	2.x.,25	(89.424.557)	(224.289.351)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		(11.370.003.894)	(11.591.321.985)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		(5.370.561.358)	(4.456.123.810)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non - Operasional	2.w.,26	16.270.018	2.155.000
Beban Non - Operasional	2.y.,26	(109.207.323)	(115.328.474)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		(92.937.305)	(113.173.474)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(5.463.498.663)	(4.569.297.284)
PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA (RUGI) NETO		(5.463.498.663)	(4.569.297.284)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2022	32.808.164.387	4.691.224.930	4.603.691.924	38.997.164.676
Tambahan Modal Disetor	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
Pembagian Untuk Pemegang Saham	-	-	(1.098.368.597)	(1.098.368.597)
Penambahan Cadangan Umum	-	399.406.763	(399.406.763)	-
Rugi Tahun Berjalan	-	-	(4.569.297.284)	(4.569.297.284)
Saldo Per 31 Desember 2023	36.808.164.387	5.090.631.693	(1.463.380.720)	37.329.498.796
Dana Setoran Modal	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
Rugi Tahun Berjalan	-	-	(5.463.498.663)	(5.463.498.663)
Saldo Per 31 Desember 2024	40.808.164.387	5.090.631.693	(6.926.879.383)	35.866.000.133

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ARUS KAS DARI:		
Aktivitas Operasi		
Rugi Tahun Berjalan	(5.463.498.663)	(4.569.297.284)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi:		
Penyusutan Aset Tetap	206.469.111	(1.286.391.370)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	56.412.496	(248.244.120)
Lainnya		1.525.700
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
PPAP Kredit yang Diberikan	3.834.934.942	7.481.035.427
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) selain Giro	10.410.484	25.450.130
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
Penempatan Pada Bank Lain	(7.436.095.036)	(6.628.398.392)
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	126.932.635	(224.348.466)
Kredit yang diberikan	18.454.819.863	11.114.620.500
Aset Lain - Lain	36.257.909	(240.830.209)
Kewajiban Segera	(29.915.716)	(516.770.135)
Utang Bunga	(6.669.844)	69.190.373
Utang Pajak	-	(221.408.721)
Simpanan Dari Bank Lain	(4.504.614.877)	(7.012.963.830)
Simpanan	(105.097.560)	3.191.676
Kewajiban lain - lain	(46.855.245)	(957.977.110)
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	5.133.490.500	(3.211.615.831)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Perolehan Aset Tetap	(94.840.000)	(407.677.000)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(94.840.000)	(407.677.000)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan:		
Setoran Modal	4.000.000.000	4.000.000.000
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	4.000.000.000	4.000.000.000
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	9.038.650.500	380.707.169
Kas dan Setara Kas Awal Periode	14.153.824.251	13.773.117.081
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	23.192.474.751	14.153.824.251
Rincian Kas dan Setara Kas		
Kas	1.355.192.700	1.044.874.900
Tabungan dan Giro	14.337.282.051	7.608.949.350
Deposito < 3 Bulan	7.500.000.000	5.500.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	23.192.474.751	14.153.824.250

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

a. Pendirian Perseroan

PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) didirikan dalam bentuk Perusahaan Daerah bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan permodalan, maka dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dan Bupati Sukamara memutuskan Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Perseroan Daerah (Perseroda).

PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) didirikan berdasarkan :

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 Tanggal 10 September 2018 oleh Notaris Arpiansyah, SH, M.Kn. Dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia No. AHU0043793.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 14 September.
- b. Akta Pengalihan Hak dan Kewajiban dari Badan Hukum lama PD. BPR Artha Sukma Sejahtera kepada badan hukum baru PT. BPR Artha Sukma tanggal 18 September 2018 No. 14 dibuat oleh Arpiansyah, S.H., M.Kn Notaris di
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) tanggal 29.
- d. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-18/KO.0902/2018 tentang Persetujuan atas Pengalihan Izin Usaha dari PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) serta persetujuan atas Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
- e. Akta Perubahan Direksi dan Komisaris serta Ganti Nama Pemegang Saham No. 07 Tanggal 15 Juni 2020 oleh Notaris Arpiansyah SH, M.Kn Dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0096008.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 18 Juni 2020.
- f. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 29 Tanggal 31 Agustus 2020 oleh Notaris Arpiansyah, SH, M.Kn. dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.030384288 Tanggal 9
- g. Akta No 14 tertanggal 20 November 2023 oleh Notaris Arpiansyah, SH., M.Kn tentang Persetujuan Pencairan Modal Disetor Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Tahun 2023. Dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat pengesahan Nomor AHU-AH.01.03-0144006 tanggal 20 November 2023.
- h. Akta No 27 tertanggal 27 September 2024 oleh Notaris Arpiansyah, SH., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat pengesahan Nomor AHU-AH.01.09-0257256 tanggal 30 September 2024.
- i. Akta No 05 tertanggal 31 Desember 2024 oleh Notaris Yosi Irawan, SH., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat pengesahan Nomor AHU-AH.01.03-0231112 tanggal 31 Desember 2024.

Ijin-ijin yang dimiliki :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 85.739.337.5-713.000 terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalanbun.
2. Nomor Induk Berusaha: 9120009500183 dengan kode 64127 tanggal 08 Mei 2019 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Tempat dan Kedudukan

PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) terletak di Jl. Pangeran Sukarma No. 228 Sukamara, Kalimantan Tengah, Indonesia.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN - *Lanjutan*

c. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat sebagai mitra golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya serta memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha

1. Penghimpunan dana
2. Penyaluran dana
3. Kegiatan usaha lainnya yang telah diberikan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No 27 tertanggal 27 September 2024 oleh Notaris Arpiansyah, SH., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat pengesahan Nomor AHU-AH.01.09-0257256 tanggal 30 September 2024. Susunan pengurus PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) per 31 Desember 2024 ialah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Ida Rumiana
Direktur	: Jokok Hariyadi, SE
Komisaris	: Dr. Prihatin Suriansyah

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, yang disajikan dalam Rupiah, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan informasi perubahan historis penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Dalam metode ini laba atau rugi netto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan/pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

c. Kas dan Setara Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

d. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Merupakan pendapatan bunga BPR dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) serta penempatan pada bank lain yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya (*accrual basis*). Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai non lancar (*Non Performing*) tidak diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Bunga atas kredit "*Non Performing*" dimasukkan dalam rekening administrasi.

Penempatan pada bank lain untuk bank konvensional giro, tabungan, dan deposito diakui secara *accrual*, sedangkan penempatan pada Bank syariah giro (wadi'ah), tabungan (mudharabah) diakui secara kas deposito dan deposito diakui

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain terdiri dari giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum. Penempatan dana pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai Pendapatan Bunga. Penyisihan Penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas dana yang ditempatkan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan dana pada bank lain tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan

f. Kredit yang Diberikan

Bank Perkreditan Rakyat mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada kreditur sebesar plafond kredit yang diperjanjikan atau dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati BPR dengan Debitur. Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung BPR. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga. Amortisasi Provisi dan Biaya Transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit itu termasuk *performing* atau *non performing*.

g. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)

Penentuan kualitas aset produktif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1 Tahun 2024 Tanggal 11 Januari 2024 yang mengklasifikasikan aset produktif dalam 5 (lima) kategori dengan prosentase penyisihan penghapusan sebagai berikut :

<u>Klasifikasi</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Prosentase PPKA</u>
Lancar	PPKA UMUM	0,5% x (Baki Debet - Nilai Agunan)
Dalam Perhatian Khusus	PPKA KHUSUS	3,0% x (Baki Debet - Nilai Agunan)
Kurang Lancar	PPKA KHUSUS	10% x (Baki Debet - Nilai Agunan)
Diragukan	PPKA KHUSUS	50% x (Baki Debet - Nilai Agunan)
Macet	PPKA KHUSUS	100% x (Baki Debet - Nilai Agunan)

Perhitungan PPKA umum sebagaimana dimaksud pada point di atas, dikecualikan untuk Aset

- i Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah; dan
- ii bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK No. 1 Tahun 2024, yaitu;
 - a. Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar.
 - b. Agunan tunai berupa:
 - tabungan, deposito, dan/atau logam mulia; dan/atau
 - Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah.
- iii Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
 - b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif;
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - d. bukti kepemilikan agunan berupa:
 - tabungan dan deposito; dan/atau
 - bukti kepemilikan dan fisik logam mulia, disimpan pada BPR penyedia.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

g. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) - *Lanjutan*

Prosentase Penyisihan Penghapusan diatas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit adalah :

- a. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- c. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau
- e. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- f. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- g. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- i. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
- j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; atau
- k. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f:

- a. ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) POJK No. 1 Tahun 2024 dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu:

- a. agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- b. agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c. nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitor kepada BPR.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

g. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) - *Lanjutan*

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:

- a. ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
- b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

h. Agunan yang Diambil Alih

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 33 / POJK.03 / 2018. Agunan yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal Debitur telah dinyatakan macet.

Pada umumnya, pengambilalihan agunan ini terjadi dalam situasi ketika debitur telah dinyatakan macet (tidak dapat membayar utangnya sesuai ketentuan). Jika debitur sudah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, BPR dapat mengambil alih agunan sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan.

Setelah agunan diambil alih, BPR wajib mengelola agunan tersebut dengan cara yang bijaksana, termasuk untuk memastikan agunan tersebut dapat memberikan nilai maksimal dalam penyelesaian kredit bermasalah. Pengelolaan ini mencakup beberapa langkah:

- i. Agunan yang diambil alih harus dinilai secara tepat untuk menentukan nilai pasar wajar dari agunan tersebut.
- ii. Jika agunan berupa barang fisik atau properti, BPR harus memastikan bahwa agunan tersebut dalam kondisi baik agar dapat dijual atau dialihkan dengan nilai yang optimal.
- iii. Jika BPR ingin menjual agunan tersebut, proses penjualannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjualan ini bisa dilakukan melalui pelelangan atau mekanisme lain yang disetujui sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh pemilik agunan.

Agunan Yang Diambil Alih akan dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

Agunan Yang Diambil Alih tidak disusutkan. Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat Agunan Yang Diambil Alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional.

BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit. Agunan Yang Diambil Alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat berdasarkan nilai yang disepakati bersama. Dalam hal taksiran nilai agunan lebih rendah dari nilai kredit, maka selisih lebih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi dibebankan ke penyisihan penghapusan kredit sebagai penghapusan tahun berjalan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambil-alihan agunan tersebut dibebankan ke Kerugian akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan sebagai beban non operasional, sedang laba akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam Akun Kewajiban Segera

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP BPR, BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

h. Agunan yang Diambil Alih

Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.03/2018 Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- 75% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.03/2018 Pasal 17 ayat (1) huruf h yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan dengan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (UU No.36 Tahun 2008 & PMK No. 96/PMK.03/2009) termasuk golongan bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus.

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tarif Penyusutan / Tahun</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Inventaris Kantor:		
Golongan I	25%	4 Tahun
Golongan II	12,5%	8 Tahun
Kendaraan:		
Golongan I	25%	4 Tahun
Golongan II	12,5%	8 Tahun

Dalam hal aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Sedangkan untuk aset tetap dan inventaris yang diperoleh bukan dari sumbangan pemilik dan diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai Pendapatan Non-operasional.

Perolehan aset melalui sewa pembiayaan (*financial lease*) merupakan aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui sewa (*lease*) apabila sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan dan harus memenuhi syarat agar dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa.

Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Aset tetap dan inventaris yang berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos Aset Tetap dan Inventaris. Kewajiban Sewa Pembiayaan disajikan dalam Pinjaman Yang Diterima.

j. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud berupa aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yaitu perangkat lunak komputer (software) dan Instalasi Listrik masing-masing diamortisasi selama 4 (empat) tahun.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

k. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos asset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca, meliputi rincian aset lain-lain dan kebijakan akuntansi yang melekat pada akun aset

l. Kewajiban Segera

Kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Pengakuan terhadap kewajiban segera adalah pada saat kewajiban telah jatuh tempo atau kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya, baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Kewajiban Segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

m. Utang Bunga

- Utang Bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menambah kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi seperti sewa pembiayaan, pinjaman diterima, pinjaman subordinasi dan modal pinjaman. Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga).
- Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh Nasabah.
- Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Utang Bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

n. Simpanan

Simpanan merupakan kewajiban kepada nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban, deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal. Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah kewajiban kepada bank lain tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Artha Sukma SK No. 196/800/Kep.DIR.BPR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan SK No. 159/800/Kep.DIR.BPR/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang besarnya suku bunga yang berlaku pada tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Suku Bunga 2024</u>
Deposito Umum dan Terkait	1	6,25%
Deposito Umum dan Terkait	3	6,25%
Deposito Umum dan Terkait	6	7,00%
Deposito Umum dan Terkait	12	7,50%
Tabungan	-	3

Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran, sedangkan deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga.

Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan. Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

o. Pinjaman Diterima

Pinjaman Diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai Beban Bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai Utang Bunga.

Pinjaman Diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos Utang Bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik (dimasukkan di rekening administratif).

p. Dana Setoran Modal - Kewajiban

Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor. Dana setoran modal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai Dana Setoran Modal – Kewajiban. Dana setoran modal yang telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai Dana Setoran Modal – Ekuitas.

Dana setoran modal – kewajiban disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

q. Modal Pinjaman

Modal pinjaman menimbulkan kewajiban kontraktual bagi BPR untuk menyelesaikannya dalam bentuk penyerahan kas dan setara kas. Keterbatasan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya atas modal pinjaman dengan adanya ketentuan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, tidak membatalkan kewajiban kontraktual tersebut.

Modal pinjaman diakui sebesar nilai pokok pinjaman. Bunga akrual atas modal pinjaman diakui sebagai Utang Bunga. Modal pinjaman disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

r. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban Lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada. Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Kewajiban lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

s. Kewajiban Imbal Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah program imbalan pasti dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut pemerintah telah menetapkan regulasi hukum imbalan kerja Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 Tentang "Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" dalam pasal 156 berbunyi "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

s. Kewajiban Imbal Pasca Kerja

Bank telah menerapkan akuntansi atas imbalan pascakerja jangka pendek mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja.

BPR berkeyakinan bahwa akan dapat memenuhi kewajiban tersebut nantinya jika karyawan purna kerja, BPR memenuhi imbalan pasca kerja dalam program iuran pasti pada program BPJS Ketenagakerjaan Nasional.

t. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.

Modal Disetor

Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Tambahan Modal

Dana Setoran Modal

Dana Setoran Modal – Ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam pos Dana Setoran Modal – Kewajiban. Dana Setoran Modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penysetor. Sedangkan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan merupakan bagian ekuitas BPR.

Tambahan Modal Disetor

- Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
- Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat: a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima; b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Saldo Laba

Saldo laba yang merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden, koreksi laba rugi periode lalu dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya. Pembagian deviden diakui sebagai pengurang saldo laba ketika deviden dideklarasikan.

- Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
- Dividen dalam bentuk aset non-KAs diakui sebesar Nilai wajar aset tersebut.
- Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar Nilai wajar saham saat Dividen dideklarasikan.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

- Cadangan tujuan dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya sudah ditetapkan
- Cadangan umum dibentuk dari laba neto setelah pajak yang digunakan untuk memperkuat modal
- Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan laba rugi periode berjalan.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

t. Ekuitas - *Lanjutan*

Penggunaan Saldo Laba

erdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 10 tanggal 10 September 2018 Pasal 23 tentang penggunaan laba dan pembagian deviden dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Pemegang Saham Pengendali ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. Cadangan 20% (dua puluh persen);
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan / Corporate Social Responsibility 3% (tiga persen);
- d. Tantiem 4% (empat persen);
- e. Jasa produksi 8% (delapan persen) dan
- f. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

u. Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung yang sebanding dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak terdiri dari dua jenis utama, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang memiliki cara pengenaan dan pembayaran yang berbeda.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak secara langsung kepada negara dan tidak dapat dipindahkan kewajibannya kepada orang lain. Dengan kata lain, pajak ini harus dibayar oleh individu atau badan yang dikenakan kewajiban pajak tersebut. Pajak langsung umumnya dikenakan berdasarkan penghasilan atau kekayaan seseorang.

Jenis-jenis pajak langsung menurut Undang-undang:

i. Pajak penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik individu maupun badan. Pajak ini termasuk dalam pajak langsung karena dikenakan langsung terhadap penghasilan atau pendapatan seseorang.

Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh)

- PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau pegawai dari hubungan kerja atau jasa yang dilakukan oleh individu tersebut kepada pemberi kerja. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja (misalnya perusahaan) dan disetorkan ke kas negara.

- PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan impor barang dan perdagangan tertentu. Pajak ini biasanya dipungut oleh pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi perdagangan, misalnya bank atau perusahaan yang menangani impor barang.

- PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan dari sumber tertentu, seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, dan imbalan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari pekerjaan atau jasa.

- PPh Pasal 25/29

PPh Pasal 25/29 mengatur tentang pembayaran pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan tahunan. PPh Pasal 25 mengatur tentang angsuran pembayaran pajak selama tahun berjalan, sementara PPh Pasal 29 berkaitan dengan penyeteroran pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan tahunan setelah dikurangi dengan angsuran PPh Pasal 25.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

u. Perpajakan - *Lanjutan*

ii. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki atau menguasai objek pajak berupa tanah dan bangunan.

iii. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PKB dikenakan pada kendaraan bermotor yang dimiliki oleh individu atau badan. Pajak ini adalah pajak atas penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara, tetapi dapat dipindahkan kewajibannya kepada orang lain. Biasanya, pajak ini dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan pembayarannya dilakukan melalui pihak ketiga, seperti produsen atau pedagang.

Jenis-jenis pajak tidak langsung menurut Undang-undang:

i. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. PPN adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dibayar oleh konsumen akhir, namun dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada setiap tahap transaksi barang dan jasa. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), yang kemudian disesuaikan dengan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

ii. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

adalah jenis pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang dianggap mewah dan memiliki harga jual yang relatif tinggi. Pajak ini dikenakan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah yang konsumsi atau kepemilikannya dianggap tidak perlu atau berlebihan, serta untuk meningkatkan penerimaan negara. PPnBM berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena tidak dikenakan pada setiap transaksi barang atau jasa, melainkan hanya pada barang-barang tertentu yang memiliki kriteria tertentu, seperti kendaraan mewah, barang elektronik, perhiasan, dan sebagainya.

iii. Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu, seperti surat kontrak atau perjanjian yang memiliki nilai tertentu. Pembayaran bea meterai ini umumnya dilakukan oleh pihak yang menerbitkan atau menandatangani dokumen tersebut.

Provisi Pajak

Provisi pajak adalah kewajiban yang diperkirakan atau diestimasi oleh perusahaan untuk membayar pajak di masa depan, yang jumlah pastinya belum diketahui dan belum dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Provisi pajak dihitung berdasarkan estimasi kewajiban pajak yang timbul selama periode tertentu, baik dari pajak penghasilan (PPh), PPN, atau jenis pajak lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), provisi pajak termasuk dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. PSAK 46 mengatur bagaimana perusahaan harus memperhitungkan kewajiban pajak yang timbul selama periode akuntansi dan bagaimana mempersiapkan pembayarannya.

Penyisihan Pajak

Penyisihan pajak adalah tindakan perusahaan dalam menyisihkan sebagian dana untuk membayar kewajiban pajak yang akan timbul di masa depan. Penyisihan ini sering dilakukan ketika perusahaan dapat memprediksi adanya kewajiban pajak yang besar berdasarkan peristiwa atau transaksi tertentu. Penyisihan pajak ini lebih berbentuk sebagai persiapan dana, bukan sebagai kewajiban yang langsung tercatat dalam laporan keuangan.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

u. Perpajakan - *Lanjutan*

Penyisihan Pajak - *Lanjutan*

Penyisihan pajak terkait dengan kegiatan perusahaan yang sudah mengidentifikasi adanya kewajiban pajak, tetapi penyisihan ini tidak mengurangi pajak yang harus dibayar saat perhitungan dilakukan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur jenis pajak yang harus disisihkan. Dalam akuntansi, penyisihan ini lebih terkait dengan pengelolaan keuangan jangka panjang dan dilaporkan sebagai bagian dari kewajiban jangka panjang. Tidak ada standar akuntansi yang secara eksplisit mengatur tentang "penyisihan" pajak, namun ada pendekatan yang lebih umum terkait dengan cadangan atau dana yang disisihkan untuk pembayaran kewajiban di masa depan.

Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) adalah dua konsep penting dalam akuntansi pajak yang berkaitan dengan perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan pengakuan pajak. Dalam pelaporan keuangan, baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan muncul karena perbedaan sementara antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang tercatat dalam laporan keuangan.

i. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets)

Aset pajak tangguhan muncul ketika jumlah pajak yang telah dibayar atau diakui lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan perhitungan laba kena pajak pada periode tersebut. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan timbul ketika perusahaan mengalami kerugian fiskal yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan atau ketika terdapat perbedaan temporer yang menguntungkan.

Secara sederhana, aset pajak tangguhan menunjukkan bahwa suatu perusahaan berpotensi membayar lebih banyak pajak pada periode tertentu dan akan memperoleh manfaat pajak yang lebih rendah di masa depan.

ii. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)

Kewajiban pajak tangguhan muncul ketika jumlah pajak yang terutang lebih rendah dari pajak yang dibayar atau diakui pada periode tersebut. Kewajiban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan antara pengakuan akuntansi dan pengakuan pajak yang menyebabkan perusahaan akan membayar lebih banyak pajak di masa depan dibandingkan dengan yang dibayarkan pada periode akuntansi saat ini.

Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan menunjukkan bahwa perusahaan akan membayar lebih banyak pajak pada masa depan terkait dengan perbedaan sementara yang ada.

Perbedaan antara pengakuan akuntansi dan pengakuan pajak sering terjadi karena perlakuan pajak yang berbeda atas beberapa jenis transaksi dan peristiwa ekonomi. Perbedaan ini dapat menyebabkan timbulnya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perpajakan merupakan kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan atau individu yang menjadi wajib pajak. Kepatuhan ini berkaitan dengan pengakuan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pajak pusat (PPh) maupun pajak daerah. Kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan akan membantu perusahaan atau individu menghindari sanksi atau denda dari otoritas pajak, serta mendukung keberlanjutan operasional yang sesuai dengan hukum.

v. Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Pengungkapannya meliputi dasar yang digunakan, tanggal efektif revaluasi, pihak yang melakukan penilaian, jumlah tercatat jenis aset tetap dan inventaris sebelum revaluasi dan jumlah surplus revaluasi aset tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - *Lanjutan*

w. Pendapatan Operasional

Pendapatan dan biaya operasional dihitung atas dasar accrual basis. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai “*Non Performing*” tidak diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Bunga atas aktiva produktif “*Non Performing*” dimasukkan dalam rekening administrasi.

Pendapatan operasional meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan. Pendapatan bunga dari kredit yang masuk kategori performing diakui secara akrual, sedangkan dari kredit yang termasuk kategori *non-performing* diakui secara kas. Provisi sebagai penambah pendapatan bunga dan biaya transaksi sebagai pengurang pendapatan bunga diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus.

x. Pendapatan Non - Operasional

Pendapatan non-operasional berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan, antara lain jasa pengiriman uang, pendapatan administrasi tabungan, denda kredit dan sebagainya. Pendapatan non – operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR dan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

y. Beban Operasional

Beban bunga merupakan beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana misalnya premi penjaminan simpanan, *cashback*, dan hadiah deposito berjangka. Beban bunga disajikan terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.

z. Beban Non - Operasional

Beban non – operasional merupakan semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan kegiatan utama BPR, misalnya kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, penjualan aset tetap dan inventaris BPR serta denda atau sanksi karena pelanggaran.

aa. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontinjensi

Kontinjensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat diinformasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Merupakan saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Kantor Kas Jelai	650.800.000	495.224.000
Kas Kantor Pusat	520.625.200	362.034.700
Kas Kantor Kas Balai	92.719.000	150.696.000
Kas Cabang Sungai Rangit	91.048.500	36.920.200
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	1.355.192.700	1.044.874.900

Kas dan setara kas telah diasuransikan pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangkaraya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jenis yang diasuransikan : Cash In Safe Khazanah Kantor Pusat
No. Polis : 0105-3131-0322-0051-00
Periode Asuransi : 07 Maret 2023 s/d 07 Maret 2024
Jumlah Pertanggungan : Rp.2.500.000.000,-
- Jenis yang diasuransikan : Cash In Safe Khazanah Kantor Cabang Sungai Rangit
No. Polis : 0305-3131-0923-0010-00
Periode Asuransi : 16 September 2023 s/d 16 September 2024
Jumlah Pertanggungan : Rp.500.000.000,-
- Jenis yang diasuransikan : Cash In Safe Khazanah Kantor Kas Balai Riam
No. Polis : 0105-3131-0323-0052-00
Periode Asuransi : 07 Maret 2023 s/d 07 Maret 2024
Jumlah Pertanggungan : Rp.250.000.000,-
- Jenis yang diasuransikan : Cash In Safe Khazanah Kantor Kas Kuala Jelai
No. Polis : 0105-3131-0323-0053-00
Periode Asuransi : 07 Maret 2023 s/d 07 Maret 2024
Jumlah Pertanggungan : Rp.750.000.000,-

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Merupakan saldo Pendapatan Bunga yang Akan Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Penempatan Pada Bank Lain	319.176.755	442.392.992
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Kredit Yang Diberikan	18.711.022	22.427.420
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	337.887.777	464.820.412

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Merupakan saldo Penempatan Pada Bank Lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Giro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 005	5.073.680.023	3.757.578.592
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah - 004	5.029.047.526	468.310.724
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 004	4.443.600	-
Jumlah Giro	10.107.171.148	4.225.889.316
Tabungan		
PT Bank Perekonomian Rakyat Lestari Bali - 006	1.858.208.835	1.243.662.099
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 001	1.378.928.607	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 002	675.219.578	2.139.397.935
Jumlah Dipindahkan	3.912.357.020	3.383.060.034

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN - Lanjutan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tabungan - Lanjutan		
Jumlah yang Dipindahkan	3.912.357.020	3.383.060.034
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 005	302.272.562	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 004	15.480.226	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 003	1.094	-
Jumlah Tabungan	4.230.110.902	3.383.060.034
Deposito Berjangka		
Berdasarkan Jangka Waktu 1 - 3 Bulan		
PT Bank Perekonomian Rakyat Sampuraga Cemerlang - 055	2.000.000.000	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Jombang (Perseroda) - 052	2.000.000.000	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Lingga Sejahtera - 053	1.000.000.000	-
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia - 054	1.000.000.000	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Lingga Sejahtera - 005	500.000.000	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Lingga Sejahtera - 004	500.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 006	500.000.000	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Jombang (Perseroda) - 050	-	2.000.000.000
PT Bank Perekonomian Rakyat Jombang (Perseroda) - 049	-	2.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - 051	-	1.000.000.000
PT Bank Perekonomian Rakyat Lingga Sejahtera - 004	-	500.000.000
Jumlah	7.500.000.000	5.500.000.000
Berdasarkan Jangka Waktu 4 - 6 Bulan		
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia - 048	500.000.000	500.000.000
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia - 047	500.000.000	500.000.000
Jumlah	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Deposito	8.500.000.000	6.500.000.000
JUMLAH PENEMPATAN PADA BANK LAIN	22.837.282.051	14.108.949.350
Penyisihan Kerugian (Non Giro)	(44.895.366)	(34.484.882)
JUMLAH PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH	22.792.386.685	14.074.464.468

Tingkat suku bunga Deposito per tahun 6,25% - 7,5% 6,25% - 7,5%

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

Merupakan saldo Kredit Yang Diberikan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Kredit yang Diberikan Terdiri Dari:		
Kredit Modal Kerja	16.056.643.670	19.513.389.000
Kredit Tanpa Angsuran (KTA) Modal Kerja	15.860.107.700	15.098.157.700
Kredit Tanpa Angsuran (KTA) Konstruksi	3.724.950.000	4.250.750.000
Kurda Sukma	2.903.853.250	1.983.310.000
Kredit Channeling Kawancicil	2.587.648.991	4.899.089.254
Kredit Karya Intern	2.461.513.500	2.677.637.000
Kredit Channeling Duha Madani Syariah	1.813.000.000	1.596.000.000
Kredit Perumahan	1.011.422.000	774.768.000
Kredit Konsumtif Perorangan	826.046.000	1.239.354.500
Jumlah Dipindahkan	47.245.185.111	52.032.455.454

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN - *Lanjutan*

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Kredit yang Diberikan Terdiri Dari: - <i>Lanjutan</i>		
Jumlah yang Dipindahkan	47.245.185.111	52.032.455.454
Kredit Tanpa Angsuran Pokok (KTP)	646.743.200	-
Kredit Investasi	283.721.500	274.033.000
Kredit Konsumtif	230.404.500	26.884.000
Kredit Sindikasi	-	5.100.000.000
Kredit Tanpa Angsuran (KTA) Talangan Operasional Organisasi	-	1.705.750.000
Kredit Channeling Komunal	-	1.428.087.730
Kredit Tanpa Angsuran (KTA) Talangan Perjalanan Dinas	-	20.495.000
Jumlah Kredit yang Diberikan	48.406.054.311	60.587.705.184
Provisi Kredit	(298.044.894)	(417.570.648)
Penyisihan Penghapusan Kredit yang Diberikan	(10.294.612.178)	(6.459.677.236)
JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN	37.813.397.239	53.710.457.300

Bank Telah Membentuk Penyisihan Penghapusan Kredit dan Manajemen Berpendapat Bahwa Jumlah Penyisihan Penghapusan Kredit yang Telah Dibukukan Adalah Cukup Untuk Menutup Kerugian yang Mungkin Timbul Akibat Tidak Tertagihnya Kredit yang Diberikan.

b. Kolektabilitas:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kolektabilitas 1	24.386.107.207	42.053.944.230
Kolektabilitas 2	4.024.417.500	3.510.007.500
Kolektabilitas 3	983.411.000	5.888.124.200
Kolektabilitas 4	5.351.408.338	1.186.672.050
Kolektabilitas 5	13.660.710.266	7.948.957.204
Jumlah	48.406.054.311	60.587.705.184

Dalam periode tahun buku 2024, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Sukma (Perseroda) telah menindaklanjuti penanganan kredit bermasalah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas aset bank, mengurangi risiko kerugian finansial, serta memastikan keberlanjutan operasional dan kesehatan keuangan bank. Berdasarkan laporan kegiatan operasional PT Bank Artha Sukma (Perseroda) Tahun 2024, terdapat kegiatan-kegiatan penting penanganan kredit bermasalah, yaitu;

1. Kredit Fintech

Kredit fintech merujuk pada layanan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan teknologi finansial (fintech) melalui platform digital. Layanan ini memungkinkan proses peminjaman dana secara online, tanpa memerlukan kehadiran fisik atau proses administratif, terlebih tidak menggunakan agunan sebagai jaminan. Fintech dalam hal ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam memberikan kredit kepada konsumen atau usaha kecil dan menengah (UKM).

Dalam hal ini, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Sukma (Perseroda) bertindak sebagai penyalur dana (*lender*) atau pemberi pinjaman, telah menyalurkan dana kepada peminjam (*borrower*) baik itu individu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun entitas lain yang memenuhi persyaratan kredit.

Sebagai lembaga keuangan, BPR Artha Sukma akan memastikan bahwa proses penyaluran dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, serta bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dalam periode tahun buku 2024 terdapat kredit fintech bermasalah yang mempengaruhi kolektabilitas bank, yaitu;

a. PT Komunal Fintech Indonesia

Total penyaluran Kredit dari awal kerjasama Juli 2022 sampai sekarang sebesar Rp. 30.683.587.730,- pendapatan yang diterima Rp. 666.689.073,- Namun Bank tidak lagi melakukan kerjasama pada bulan Agustus 2024. Dikarenakan suspen pembatalan pengambilan proyek sebanyak 2 kali (Factsheet sebagai dokumen analisa dari Komunal tidak sesuai dengan pengecekan kembali oleh Bank). Dan informasi dari internal komunal terdapat project repetisi negatif yang dikelola komunal, sehingga akan menunggu waktu untuk Borrower menjadi macet.

b. PT Kawan Cicil Teknologi Utama

Total penyaluran Kredit dari Awal kerjasama Oktober 2022 sampai sekarang sebesar Rp. 12.401.000.000,- Kredit teridentifikasi borrower tidak dapat melakukan pelunasan pinjaman pada bulan April 2023 dengan OS Kredit Rp. 7 Milyar. Bank berupaya melakukan penurunan OS Kredit.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN - *Lanjutan*

1. Kredit Fintech - *Lanjutan*

b. PT Kawan Cicil Teknologi Utama - *Lanjutan*

OS Kredit yang tersisa sebesar Rp. 4.024.494.209,- (Termasuk yang telah diHapus Buku Rp. 1.436.845.218,-) dengan Rincian ;

- i. PT Sumber Sang Surya OS Kredit Rp. 1 Milyar (Hapus Buku)
- ii. PT Rifky Jaya Sakti OS Kredit Rp. 436.845.218 (Hapus Buku)
- iii. PT Plastik Kiat Kencana OS Kredit Rp. 992.078.566,- (Macet, Restrukturisasi pengurangan pokok 5% tahun pertama dan suku bunga 11% pertahun).
- iv. PT Karya Sentosa Raya OS Kredit Rp. 986.451.218,- (Diragukan, Restrukturisasi pengurangan pokok 5% tahun pertama dan suku bunga 11% pertahun)
- v. PT Daichindo Sukses Mandiri OS Kredit Rp. 609.119.207,- (Lancar, Restrukturisasi perubahan skema pembayaran pokok+bunga selama 18 bulan)

2. Kredit Irwan Budianur (OS Kredit Rp. 3.708.233.000,-)

3. Kredit Merry Kuslia (OS Kredit Rp. 2.977.857.700,-)

4. Kredit Bambang Pamungkas (OS Kredit Rp. 1.929.665.320,-)

5. Kredit Topengan (Kantor Cabang Sungai Rangit)

Kredit topengan adalah istilah yang merujuk pada jenis kredit yang disalurkan dengan menggunakan identitas atau informasi yang tidak benar atau palsu, atau dengan tujuan untuk menutupi atau menyembunyikan fakta sebenarnya tentang kondisi peminjam. Kredit topengan sering kali melibatkan manipulasi data oleh debitur, seperti memberikan informasi palsu mengenai penghasilan, pekerjaan, atau aset, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan kredit yang sebenarnya tidak layak bagi mereka.

Dalam menanggapi persoalan kredit bermasalah yang mempengaruhi kolektabilitas, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Sukma telah melakukan sejumlah upaya untuk menindaklanjuti dan mengatasi masalah tersebut, guna memastikan kesehatan finansial bank tetap terjaga dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPR Artha Sukma antara lain:

1. Restrukturisasi Kredit

Bank menawarkan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman. Ini bisa mencakup perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, atau perubahan jadwal pembayaran, dengan tujuan membantu debitur untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa menyebabkan beban berlebih.

2. Penagihan dan Pendekatan Proaktif

Bank telah melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam menagih kredit yang bermasalah, termasuk menghubungi debitur untuk mencari solusi pembayaran atau mencari jalan tengah yang bisa disepakati bersama. Jika diperlukan, bank juga bisa melakukan kerjasama dengan agen penagihan atau pihak ketiga yang berkompeten untuk membantu proses ini.

3. Penyelesaian Secara Hukum

Jika upaya-upaya restrukturisasi dan penagihan tidak berhasil, bank akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah, seperti melakukan eksekusi jaminan atau proses penyelesaian hukum lainnya yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Meningkatkan Proses Penilaian Kredit

Bank telah memperkuat proses penilaian kredit untuk menghindari pemberian pinjaman yang berisiko tinggi di masa depan. Hal ini termasuk meningkatkan penggunaan data dan teknologi dalam menganalisis kelayakan peminjam, serta memastikan bahwa pinjaman hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali.

5. Pencadangan Kerugian Kredit (CKPN)

Bank telah menambah pencadangan kerugian kredit (CKPN) untuk mengantisipasi potensi kerugian dari kredit bermasalah. Hal ini merupakan langkah penting untuk melindungi neraca bank dari dampak negatif dan menjaga rasio kecukupan modal yang sehat.

Dengan langkah-langkah tersebut, BPR Artha Sukma berupaya untuk mengatasi persoalan kredit bermasalah dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap kualitas aset dan stabilitas keuangan bank. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional bank dan melindungi kepentingan para nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Merupakan saldo Agunan Yang Diambil Alih per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Terdiri Dari:		
Agus Haryono	641.900.000	641.900.000
Nasip	515.625.000	515.625.000
Jasmianto	280.000.000	280.000.000
Herlan Albari	-	238.498.000
JUMLAH AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH	1.437.525.000	1.676.023.000

- a. AYDA atas nama Nasip, berdasarkan berita acara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direksi, bank telah mengambil alih jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan Surat Keterangan Tanah No: 590/191/KM-SM/2021 dan No: 590/192/KM• SM/2021 terletak di Jalan Batangan, Desa Kartamulia Rt.003 Rw.001, Kabupaten Sukamara dengan nilai taksasi Rp.515.663.200.-.
- b. AYDA atas nama Jasmianto berdasarkan Surat keterangan No.129/800/AS/ADM-KREDIT/XI/2022 tertanggal tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Direksi, bank telah mengambil alih jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat No.745 Tanggal 17 Juni 2021 An. Sudibyo, SKT No.590/332/KM-SM/2016 Tanggal 23 Mei 2016 An. Sudibyo dan Bank telah menyatakan Lunas untuk kredit Atas nama Jasmianto suai dengan Dokumentasi penyelesaian AYDA yang dilakukan oleh Bank.
- c. AYDA atas nama Agus Haryono, berdasarkan berita acara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direksi, bank telah mengambil alih jaminan kredit berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3950 terletak di Jalan Diponegoro, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Safrudin Harahap, SHM No. 83 terletak di Desa Kotawaringin Hilir, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Gusli Jari Masuda, SHM No. 880 terletak di Jl. A.Yani, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Gusli Jari Masuda, jaminan kredit berupa tanah dengan SHM No. 85 terletak di Jl. Poros, Desa Sungai Raja, Kab. Sukamara atas nama Bambang Hartanto. SKT No. 593/201/IV/NS-SM/2016 terletak di jalan Pemekaran Rt.001, Desa Natai Sedawak, Kab. Sukamara atas nama Rissa Sekar, SKT No. 590/304/09/kds-ns/2004 terletak di Jl. Perkebunan Kelapa Sawait Rt.01, Desa Natai Sedawak, Kab. Sukamara atas nama Gusti Muhammad Ziril, SKT No. 590/516/VII/NS-SM/2010 terletak di Jl. Natai Pulau Rt.003, Desa Natai Sedawak, Kab. Sukamara atas nama Rissa Sekar, SKT No. 181.1/149/DSD/K• PUXI I/2017 terletak di Jl. Cemara Indah Rt.06, Desa Sungai Damar, Kee Pantai Luci, Kab Sukamara atas nama Rissa Sekar, SKT No. 593/139/MD-SM/2015 terletak di Jl. Makmur Djali Rt.14 Rw.IV Kel.Mendawai atas nama Gusti Akhmad, SKT No. 181.1/35/DS/2018 terletak di Jl. Baru Desa Sungai Raja, Kee. Jelai atas nama Rissa Sekar dengan total nilai taksasi Rp641.900.000.

8. ASET TETAP

Merupakan saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2024	Saldo Awal	Penambahan	Mutasi Pengurangan	Adjusment	Saldo Akhir
Harga Perolehan :					
Tanah	589.026.684	-	-	-	589.026.684
Gedung dan Bangunan	1.118.202.000	-	-	-	1.118.202.000
Kendaraan	957.606.332	-	-	-	957.606.332
Inventaris Kantor	1.303.565.397	94.840.000	-	-	1.398.405.397
Jumlah Harga Perolehan	3.968.400.413	94.840.000	-	-	4.063.240.413
Akumulasi Penyusutan:					
Gedung dan Bangunan	55.910.100	55.910.100	-	-	111.820.200
Kendaraan	390.983.291	104.615.484	-	-	495.598.776
Inventaris Kantor	1.197.981.329	45.943.527	-	-	1.243.924.854
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.644.874.720	206.469.111	-	-	1.851.343.830
Nilai Buku	2.323.525.693				2.211.896.583

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TETAP - Lanjutan

TAHUN 2023	Saldo Awal	Penambahan	Mutasi Pengurangan	Adjustment	Saldo Akhir
Harga Perolehan :					
Tanah	589.026.684	-	-	-	589.026.684
Gedung dan Bangunan	1.118.202.000	-	-	-	1.118.202.000
Kendaraan	633.333.332	324.273.000	-	-	957.606.332
Inventaris Kantor	1.220.161.397	83.404.000	-	-	1.303.565.397
Jumlah Harga Perolehan	3.560.723.413	407.677.000	-	-	3.968.400.413
Akumulasi Penyusutan:					
Gedung dan Bangunan	-	55.910.100	-	-	55.910.100
Kendaraan	299.879.181	91.104.110	-	-	390.983.291
Inventaris Kantor	1.158.704.905	39.276.424	-	-	1.197.981.329
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.458.584.086	186.290.633	-	-	1.644.874.719
Nilai Buku	2.102.139.327				2.323.525.694

Aset tetap berupa kendaraan telah diasuransi kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis yang diasuransikan : Polis Asuransi Innova Reborn
No. Polis : 0202.23.057.1.00014-1
Periode Asuransi : 19 Agustus 2023 - 19 Agustus 2024

Jenis yang diasuransikan : Polis Asuransi Innova
No. Polis : 0202.23.057.1.00015-4
Periode Asuransi : 19 Agustus 2023 - 19 Agustus 2024

Jenis yang diasuransikan : Polis Asuransi Terios
No. Polis : 0202.23.057.1.00016-7
Periode Asuransi : 19 Agustus 2023 - 19 Agustus 2024

Jenis yang diasuransikan : Polis Asuransi Avanza
No. Polis : 0202.23.057.1.000717-1
Periode Asuransi : 19 Agustus 2023 - 19 Agustus 2024

9. ASET TIDAK BERWUJUD

Merupakan saldo Aset Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Software dan System BPR	447.717.044	442.717.044
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(309.656.616)	(248.244.120)
JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD	138.060.428	194.472.924

10. ASET LAIN-LAIN

Merupakan saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya yang Diuangmukakan	61.440.000	10.720.000
Sewa Gedung Kantor	57.125.019	112.625.007
Premi Asuransi LPS	29.215.923	35.350.730
Uang Muka Pajak	25.000.000	24.000.000
Asuransi Kasanah	9.033.336	5.409.177
Asuransi Kendaraan	8.021.361	12.334.482
Asuransi Kebakaran	6.336.657	8.215.797
Jumlah Dipindahkan	196.172.296	208.655.193

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET LAIN-LAIN - Lanjutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah yang Dipindahkan	196.172.296	208.655.193
Kas Kecil	4.500.000	4.500.000
Sewa Rumah Dinas	3.900.000	-
Hosting dan Domain Website	4	-
Biaya DPLK	-	27.675.016
JUMLAH ASET LAIN-LAIN	204.572.300	240.830.209

11. KEWAJIBAN SEGERA

Merupakan saldo Kewajiban Segera per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Titipan Nasabah	30.121.000	30.621.000
Titipan Premi LPS	25.631.563	38.621.139
Titipan Pajak	21.048.871	20.599.858
Titipan Akses / Jamsostek	18.325.114	16.308.133
Titipan Infaq	13.769.117	13.871.976
Titipan BPJS	9.389.325	7.996.014
Titipan PPh Pasal 21	3.230.170	8.112.178
Titipan Asuransi JAMKRIDA	2.000.000	16.864.000
Titipan Baznas	657.004	593.582
Titipan Premi Asuransi	577.480	577.480
Titipan Bunga Deposito	312.498	312.498
Pembagian Laba Untuk PAD	0,20	-
Titipan PPh Pasal 25	-	500.000
JUMLAH KEWAJIBAN SEGERA	125.062.142	154.977.858

12. UTANG BUNGA

Merupakan saldo Utang Bunga per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bunga Deposito yang Masih Harus Dibayar	33.092.883	37.186.115
Bunga Tabunga yang Masih Harus Dibayar	508.065	3.084.677
JUMLAH UTANG BUNGA	33.600.948	40.270.792

13. PERPAJAKAN

Merupakan saldo Perpajakan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial dengan laba fiskal perusahaan adalah sebagai berikut:		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(5.463.498.663)	(4.569.297.284)
Koreksi Fiskal Positif (Negatif) :		
Beban Sumbangan	48.938.000	43.858.500
Beban Promosi dan Pemasaran	34.920.000	-
Beban Baju Seragam Karyawan	27.840.601	-
Beban Olahraga	12.000.000	15.620.000
Beban Non Operasional Lainnya	1.500.000	1.800.000
Beban Bantuan	2.800.000	-
Beban Sanksi OJK	2.504.000	7.314.400
Beban Denda Administrasi	124.114	1.129.450
Jumlah	130.626.715	69.722.350

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN - Lanjutan

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba Rugi Fiskal	(5.332.871.948)	(4.499.574.934)
Laba Rugi Fiskal Dibulatkan	(5.332.872.000)	(4.499.574.999)
PPh Badan yang Harus Dibayar	<u>(5.332.872.000)</u>	<u>(4.499.574.999)</u>
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		
Kerugian Kompensasi Fiskal	(5.332.871.948)	(4.499.574.934)

Berdasarkan *self-assessment system*, Bank menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor Pajak Berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Utang pajak atau kurang bayar dapat berbeda dengan laporan keuangan yang saat ini diselesaikan jika terdapat koreksi dari fiskus pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak pada masa pajak yang akan datang dalam jangka waktu maksimal 5 tahun setelah tahun kerugian fiskal tersebut terjadi. Kerugian fiskal yang tidak digunakan dalam jangka waktu 5 tahun akan kedaluwarsa dan tidak dapat dikompensasikan lagi.

14. SIMPANAN

Merupakan saldo Simpanan Dari Nasaah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Tabungan:		
Pihak Terkait	-	111.068.300
Pihak Tidak Terkait	-	14.766.724.151
Jumlah Tabungan	<u>-</u>	<u>14.877.792.451</u>
Deposito:		
Pihak terkait	-	90.000.000
Pihak Tidak Terkait	-	13.397.420.635
Jumlah Deposito	<u>-</u>	<u>13.487.420.635</u>

Telah dilakukan reklasifikasi terhadap simpanan sehingga mempengaruhi penyajian akun simpanan pada catatan atas laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar nilai masing-masing simpanan yang terdiri dari produk tabungan bank dan simpanan deposito dapat terlihat.

Tabungan:		
Tabungan Siswa	455.261.800	-
Tabungan Sukamara	13.402.086.963	-
Tabungan SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)	58.667.522	-
Jumlah	<u>13.916.016.285</u>	<u>-</u>
Deposito:		
Deposito Berjangka Waktu 1 Bulan	2.888.175.000	-
Deposito Berjangka Waktu 3 Bulan	5.900.000.000	-
Deposito Berjangka Waktu 6 Bulan	1.756.759.549	-
Deposito Berjangka Waktu 12 Bulan	3.799.164.693	-
Jumlah	<u>14.344.099.242</u>	<u>-</u>
JUMLAH SIMPANAN	<u><u>28.260.115.527</u></u>	<u><u>28.365.213.086</u></u>

Penyajian akun simpanan setelah dilakukan reklasifikasi.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Merupakan saldo Simpanan dari Bank Lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Tabungan;		
Kantor Pusat		
PT Bank Perekonomian Rakyat Lingga Sejahtera	207.701.817	201.562.615
Sub - Jumlah	<u>207.701.817</u>	<u>201.562.615</u>
Kantor Cabang Sungai Rangit		
PT Bank Perekonomian Rakyat Lingga Sejahtera	248.311.715	240.964.085
Sub - Jumlah	<u>248.311.715</u>	<u>240.964.085</u>
Jumlah Tabungan	<u>456.013.532</u>	<u>442.526.700</u>
Deposito;		
Berdasarkan Jangka Waktu 1 - 3 Bulan		
PT Bank Perekonomina Rakyat Lestari Bali	200.000.000	6.000.000.000
Sub - Jumlah	<u>200.000.000</u>	<u>6.000.000.000</u>
Berdasarkan Jangka Waktu 4 - 6 Bulan		
PT Bank Perekonomina Rakyat Marunting Sejahtera	1.000.000.000	1.000.000.000
Sub - Jumlah	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>
Jumlah Deposito	<u>1.200.000.000</u>	<u>7.000.000.000</u>
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN	<u>1.656.013.532</u>	<u>7.442.526.700</u>

16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Merupakan saldo kewajiban Lain-lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Cadangan Dana Kesejahteraan	150.206.634	-
Cadangan Kegiatan	87.972.092	115.337.842
Corporate Social Responsibility	60.312.387	49.315.157
Cadangan Biaya Pendidikan	51.635.316	33.067.460
Kesejahteraan Pengurus dan Pegawai	1	1
Cadangan Dana	-	199.261.215
JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN	<u>350.126.430</u>	<u>396.981.675</u>

17. MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR

Merupakan saldo Modal Ditempatkan dan Disetor per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Modal Disetor	40.808.164.387	36.808.164.387
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	<u>40.808.164.387</u>	<u>36.808.164.387</u>

Berdasarkan Akta Notaris Yosi Irawan, SH., M.KN. Tanggal 31 Desember 2024 nomor 05 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukma, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor surat AHU-0286995.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024, telah dinyatakan dalam keputusan rapat tersebut, menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan komposisi sebagai berikut :

Nama	Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
Pemerintah Kabupaten Sukar	Seri A	1.000.000	40.708	40.708.000.000
Pemerintah	Seri B	164.387	1	164.387
PT. Bangun Seukma Jaya	Seri A	1.000.000	100	100.000.000
Jumlah			<u>40.809</u>	<u>40.808.164.387</u>

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. CADANGAN

Merupakan saldo Cadangan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Cadangan Umum	5.090.631.693	5.090.631.693
JUMLAH CADANGAN	<u>5.090.631.693</u>	<u>5.090.631.693</u>

19. SALDO RUGI

Merupakan saldo dari Saldo Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rugi Tahun Lalu	(4.569.297.283)	-
Rugi Tahun Berjalan	(5.463.498.663)	(4.569.297.284)
JUMLAH SALDO RUGI	<u>(10.032.795.946)</u>	<u>(4.569.297.284)</u>

20. PENDAPATAN OPERASIONAL

Merupakan saldo Pendapatan Operasional per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
PENDAPATAN BUNGA		
Bunga Dari Bank Lain;		
Deposito Berjangka	385.928.698	272.611.291
Tabungan	83.550.978	21.941.362
Giro	66.286.242	142.563.513
Sub Jumlah	535.765.918	437.116.166
Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank;		
Kredit yang Diberikan	6.114.873.920	6.800.628.414
Koreksi Atas Pendapatan	-	(23.660.307)
Sub Jumlah	6.114.873.920	6.776.968.107
Pendapatan Provisi dan Komisi	180.207.515	151.638.347
Pendapatan Administrasi Kredit	187.704.789	175.680.060
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA	<u>7.018.552.141</u>	<u>7.541.402.680</u>

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Merupakan saldo Pendapatan Operasional per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Adjusment Kelebihan PPAP Kredit	169.339.139	782.264.462
Denda Kredit	122.586.030	102.352.874
Administrasi Tabungan	103.831.468	144.838.067
Adjusment Kelebihan PPAP PBL	45.202.178	89.305.173
Pendapatan Kredit Hapus	22.893.350	49.819.350
Lainnya	8.239.807	14.038.310
Penaalty Denda Deposito	3.145.000	1.625.000
Penalti Break Tesis	550.000	450.000
Pendapatan Dokumen Reverensi Bank	175.000	-
Fee Based Income Aplikasi Artha Sukma	51.800	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	<u>476.013.772</u>	<u>1.184.693.237</u>
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	<u>7.494.565.913</u>	<u>8.726.095.917</u>

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN BUNGA

Merupakan saldo Beban Bunga per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
BEBAN BUNGA		
Pihak Ketiga Bukan Bank;		
Tabungan	10.994.220	16.132.507
Deposito	247.853.009	327.780.951
Jumlah	258.847.229	343.913.458
Pihak Ketiga;		
Tabungan	363.872.509	380.804.109
Deposito	800.335.731	783.706.442
LPS	62.016.206	67.431.051
Tesis	8.251.920	12.996.000
Bunga Simpanan	1.799.783	2.046.681
Jumlah	1.236.276.149	1.246.984.283
JUMLAH BEBAN BUNGA OPERASIONAL	1.495.123.378	1.590.897.741

23. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN dan PENYUSUTAN

Merupakan saldo Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban Penyisihan Kerugian;		
Beban Penyisihan Aset Produktif	6.815.082.750	6.570.784.904
Beban Penyisihan Kerugian PPBL Tab +/- Dep	55.612.662	51.229.913
Jumlah	6.870.695.412	6.622.014.817
Beban Penyusutan;		
Beban Penyusutan Aset Tetap	-	186.290.597
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	51.177.080
Jumlah	-	237.467.677
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN dan PENYUSUTAN	6.870.695.412	6.859.482.494

Telah dilakukan reklasifikasi beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tidak berwujud kedalam beban administrasi dan umum, sehingga penyajian beban penyusutan terpisah dengan beban penyisihan kerugian. Hal ini dilakukan agar nilai beban penyusutan masing-masing aset tetap dan aset tidak berwujud dapat terlihat. *Lihat catatan No. 24 (beban penyusutan).*

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Merupakan saldo Beban Administrasi dan Umum per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban Tenaga Kerja		
Beban Gaji Pokok	2.490.861.608	2.367.241.530
Beban Honorarium	186.274.070	269.413.664
Beban Tunjangan Hari Raya (THR)	134.730.298	231.281.891
Beban Biaya Uang Lembur	36.950.000	11.840.000
Beban Perjalanan Dinas	74.586.675	134.819.144
Beban Insentif Realisasi Kredit	15.555.000	1.010.000
Beban Survey Awal	15.510.000	2.130.000
Beban Tenaga Kerja Lainnya	6.610.000	122.191.045
Beban Insentif Konten	3.875.000	300.000
Beban Rekrutmen	3.150.000	-
Jumlah Dipindahkan	2.968.102.651	3.140.227.274

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM - Lanjutan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Tenaga Kerja - Lanjutan		
Jumlah yang Dipindahkan	2.968.102.651	3.140.227.274
Beban Honor TPKB	1.400.000	-
Beban Premi Tenaga Kerja	-	23.300.000
Beban Tunjangan Representasi Direksi	-	68.764.000
Beban Penggantian Hak	-	22.873.089
Jumlah	2.969.502.651	3.255.164.363
Beban Pendidikan		
Beban Pendidikan dan Pelatihan	240.000.000	205.549.000
Jumlah	240.000.000	205.549.000
Beban Sewa		
Beban Sewa Gedung	55.499.988	55.500.036
Jumlah	55.499.988	55.500.036
Beban Premi Asuransi		
Beban Premi Asuransi Kesehatan	77.324.114	73.086.689
Beban Premi Asuransi Hari Tua	69.587.536	65.470.054
Beban DPLK	27.675.016	37.674.965
Beban Premi Asuransi Kasanah	20.569.992	24.079.992
Beban Premi Asuransi Kendaraan	17.262.220	17.036.385
Beban Premi Asuransi Kebakaran	1.879.140	1.986.643
Jumlah	214.298.018	219.334.728
Beban Barang dan jasa		
Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	111.911.981	128.135.700
Beban Listrik Kantor	82.678.879	71.171.100
Beban Service Program USSI	43.560.000	55.860.000
Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	40.013.100	55.376.430
Beban Perlengkapan	39.724.064	48.041.644
Beban Lainnya	37.820.500	40.186.500
Beban Konsumsi	34.087.900	72.728.700
Beban Baju Seragam Karyawan	27.840.601	15.720.000
Beban Jasa KAP	25.000.000	25.000.000
Beban Barang Cetak	20.640.000	20.570.000
Beban Jasa Notaris	18.500.000	22.000.000
Beban Indihome	14.945.995	13.130.491
Beban Telepon Kantor	12.574.080	12.574.080
Beban Pengiriman Surat	3.099.600	3.867.900
Beban Pengiriman Barang	2.411.000	2.605.000
Beban Hosting dan Domain	1.584.996	825.000
Bahan Bakar Minyak (BBM) Genset	1.266.000	1.543.000
Beban Pulsa Kantor	1.024.462	3.352.495
Beban Perlengkapan P3K	722.000	1.260.000
Beban Iuran TV Kabe	600.000	600.000
Beban PT Aulia Sentral Multi Data	555.000	-
Beban Jasa Konsultan	-	9.000.000
Beban Berlangganan KHU	-	2.480.000
Jumlah	520.560.158	606.028.040

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM - Lanjutan

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Aset Tetap;		
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	104.615.484	-
Beban Penyusutan Kendaraan	55.910.100	-
Beban Penyusutan Gedung	45.943.527	-
Jumlah	206.469.111	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud;		
Aplikasi Artha Sukma (Cobranding Speedcash)	60.000.000	-
Website Bank Artha Sukma	1.412.496	-
Jumlah	61.412.496	-
Penyajian beban penyusutan setelah dilakukan reklasifikasi. <i>Lihat catatan No. 23 (beban penyisihan kerugian dan penyusutan)</i>		
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor	2.793.000	3.930.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	30.764.174	36.118.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin	12.664.000	16.635.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan	52.120.000	64.287.200
Jumlah	98.341.174	120.970.200
Beban Pajak Non PPh		
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	472.260	2.012.727
Beban Pajak Kendaraan	22.077.400	18.115.200
Beban Retribusi	452.000	484.000
Beban Reklame	2.754.313	2.037.200
Beban Pajak Lainnya	18.044.356	22.354.647
Jumlah	43.800.329	45.003.774
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	<u>4.409.883.925</u>	<u>4.507.550.141</u>

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Merupakan saldo Beban Operasional Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Beban Administrasi Bank	6.303.443	5.442.800
Beban Jasa Tagih Kredit	1.480.925	199.210
Beban Sukamata Fair	22.080.000	11.346.000
Beban Publikasi	2.500.000	3.500.000
Beban Promosi dan Pemasaran	34.920.000	27.162.000
Beban Hadiah	600.000	30.745.000
Beban Operasional Lainnya	30.940	73.573.647
Beban Bantuan	2.800.000	10.400.000
Beban Fintech	18.709.249	61.920.694
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL ALAINNYA	<u>89.424.557</u>	<u>224.289.351</u>

Beban fintech ialah biaya administrasi pengembalian dana yang dibebankan kepada Bank oleh PT Komunal Finansial Indonesia, sesuai yang berlaku dalam syarat dan ketentuan penyelenggaraan Prodak Pembiayaan Fintech.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
ARTHA SUKMA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Merupakan Pendapatan (Beban) Non Operasional untuk tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Pendapatan Non Operasional		
Laba Penjualan Agunan yang Diambil Alih	9.002.000	-
Pendapatan Non Operasional Lainnya	5.630.000	1.500.000
Insentif Agen Asuransi BPJS	900.018	-
Pendapatan Jasa Loker PDAM Sukamara	738.000	655.000
Jumlah Pendapatan Non Operasional	16.270.018	2.155.000
Beban Non Operasional		
Beban Sumbangan	48.938.000	43.858.500
Beban Iuran OJK	35.320.809	36.006.124
Beban Iuran Perbarindo	12.000.000	7.200.000
Beban Olahraga	8.820.400	15.620.000
Beban Sanksi OJK	2.504.000	7.314.400
Lainnya	1.500.000	1.800.000
Beban Denda Administrasi Pajak	124.114	1.129.450
Beban Iuran Perbamida	-	2.400.000
Jumlah Beban Non Operasional	109.207.323	115.328.474
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(92.937.305)	(113.173.474)

27. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

KOMITMEN:

Fasilitas Pinjaman yang Diterima dan Belum Ditarik

Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum Ditarik

Jumlah Komitmen

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
-	-
-	-
-	-

KONTIJENSI:

Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

a. Bunga Kredit yang Diberikan

Aset Produktif yang Dihapusbuku

a. Kredit yang Diberikan

b. Pendapatan Bunga Atas Kredit yang Dihapusbuku

Jumlah Kontijensi

2.984.554.852	2.292.315.844
3.806.764.618	1.018.349.300
-	-
6.791.319.470	3.310.665.144

28. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan perseroan sebagaimana diuraikan dimuka yang telah diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2025.

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF & NON PERFORMING LOAN
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

NO	KOLEKTIBILITAS	JUMLAH	FAKTOR %	AKTIVA PRODUKTIF YG DIKLASIFIKASIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Lancar	24.386.107.207	0	-
2.	Dalam Perhatian Khusus	4.024.417.500	0	-
3.	Kurang Lancar	983.411.000	50	491.705.500,00
4.	Diragukan	5.351.408.338	75	4.013.556.254
5.	Macet	13.660.710.266	100	13.660.710.266
Jumlah		48.406.054.311		18.165.972.020
I. Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan				18.165.972.020
II. Aktiva Produktif				
a. Kredit Yang Diberikan				48.406.054.311
b. Antar Bank Aktiva (Tabungan + Deposito + Giro)				22.837.282.051
				71.243.336.362
III. = $\frac{\text{Aktiva Produktif Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}}$				x 100%
= $\frac{18.165.972.020}{71.243.336.362}$				x 1 = 25,50%
				TKS = TIDAK SEHAT
Ketentuan Bank Indonesia				
0,00 % s/d 10,35 % = Sehat				
> 10,35 % s/d 12,60 % = Cukup Sehat				
> 12,60 % s/d 14,85 % = Kurang Sehat				
> 14,85 % = Tidak Sehat				
IV. Non Performing Loan				
NPL Bersih			NPL Kotor	
= $\frac{\text{Total Coll 3, 4 \& 5 - PPAP}}{\text{Kredit Yang Diberikan}}$ x 100%			= $\frac{\text{Total Coll 3, 4 \& 5}}{\text{Kredit Yang Diberikan}}$ x 100%	
= $\frac{23.836.334.700 - 10.025.412.210}{48.406.054.311}$ x 100%			= $\frac{23.836.334.700}{48.406.054.311}$ x 100%	
= 20,60%			= 41,31%	
= TIDAK SEHAT			= TIDAK SEHAT	
Ketentuan Bank Indonesia				
< 5,00% = Sehat				
>= 5,00% = Tiak Sehat				

RASIO RETURN ON ASSETS (ROA) dan
RASIO BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSERODA)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

*Dalam Ribuan

RETURN ON ASSETS (ROA)

Laba	(5.358.633)	=	- 8,03%
Rata -Rata Total Aktiva 12 Bulan	66.729.898		Tidak Sehat

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan

>=	2,00%			= Peringkat 1 - Sangat Baik
>	1,50%	s/d	2,00%	= Peringkat 2 - Baik
>	1,00%	s/d	1,50%	= Peringkat 3 - Cukup Baik
>	0,50%	s/d	1,00%	= Peringkat 4 - Kurang Baik
<	0,50%		ke bawah	= Peringkat 5 - Tidak Baik

RASIO BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)

Biaya Operasional	12.865.927	=	171,67
Pendapatan Operasional 12 Bulan	7.494.566		Tidak Sehat

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

<=	85,00%			= Peringkat 1 - Sangat Baik
>	85,00%	s/d	90%	= Peringkat 2 - Baik
>	90,00%	s/d	95,00%	= Peringkat 3 - Cukup Baik
>	95,00%	s/d	100,00%	= Peringkat 4 - Kurang Baik
>	100,00 %		Keatas	= Peringkat 5 - Tidak Baik

Bulan	Aktiva	Pendapatan Oprs. Kotor	Biaya Oprs. Kotor	Laba Sebelum Pajak
Januari	76.504.941	703.033	1.536.186	- 844.632
Februari	75.740.681	576.149	1.035.146	- 459.148
Maret	69.817.820	735.133	588.872	- 135.649
April	68.425.009	570.067	1.922.187	- 1.359.584
Mei	68.343.279	595.474	661.551	- 81.919
Juni	63.025.890	639.160	1.160.576	- 521.334
Juli	62.372.689	641.240	1.546.616	- 912.868
Agustus	62.680.688	651.161	993.923	- 346.117
September	62.951.133	535.421	573.911	- 36.587
Oktober	62.587.673	668.264	673.614	- 15.846
November	62.018.075	649.202	881.220	- 255.605
Desember	66.290.919	530.263	1.292.123	- 765.508
Jumlah 12 Bulan	800.758.797	7.494.567	12.865.925	- 5.358.633
Rata - Rata 12 Bulan	66.729.898			

RASIO PENDAPATAN BUNGA BERSIH TERHADAP RATA RATA TOTAL ASET PRODUKTIF
NET INTEREST MARGIN (NIM)
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

RASIO NIM

1. Pendapatan Bunga Bersih *)	5.523.428.763
2. Rata - Rata Total Aset Produktif **)	70.158.418.901
3. Rasio NIM	7,88%
(% Pendapatan Bunga Bersih terhadap Rata - Rata Total Aset Produktif)	

TKS

=

Peringkat 3 - Cukup Baik

*) Jumlah pendapatan bunga yang disetahunkan dikurangi dengan beban bunga yang disetahunkan.

**) Hasil penjumlahan keseluruhan total aset produktif posisi bulan pertama awal tahun sampai dengan posisi bulan laporan dibagi dengan jumlah laporan.

Berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

>= 10,00%	=	Peringkat 1 - Sangat Baik
> 8,00% s/d 10,00%	=	Peringkat 2 - Baik
> 6,00% s/d 8,00%	=	Peringkat 3 - Cukup Baik
> 4,00% s/d 6,00%	=	Peringkat 4 - Kurang Baik
< 4,00% Ke Bawah	=	Peringkat 5 - Tidak Baik

Bulan	Penempatan Bank Lain	Kredit yang Diberikan
Januari	14.730.599.365	58.964.418.219
Februari	12.847.511.180	60.136.494.380
Maret	10.601.971.206	61.690.833.232
April	10.135.550.384	61.524.576.272
Mei	10.146.658.426	61.738.671.735
Juni	10.532.289.304	57.080.991.593
Juli	12.459.159.958	55.643.675.662
Agustus	14.332.030.308	54.213.059.069
September	16.204.702.003	52.472.123.266
Oktober	16.361.765.378	51.040.297.959
November	17.164.280.289	50.934.076.156
Desember	22.837.282.051	48.108.009.417
Rata - rata	14.029.483.321	56.128.935.580

LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Kredit Yang Diberikan			48.406.054.311
2. Dana Yang Diterima			
a. Tabungan	13.916.016.285		
b. Deposito	14.344.099.242		
Jumlah Dana			28.260.115.527
3. Ratio Kredit dibandingkan dengan Dana yang diterima (LDR)			
Rasio			
$\frac{48.406.054.311}{28.260.115.527} \times 100\%$	=		171,29%
	TKS	=	TIDAK SEHAT
Ketentuan Bank Indonesia			
<= 94,75 %	=	Sehat	
> 94,75 % s/d 98,50 %	=	Cukup Sehat	
> 98,50 % s/d 102,25 %	=	Kurang Sehat	
> 102,25 %	=	Tidak Sehat	

CASH RATIO
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. ALAT LIKUID		15.692.474.751
a. Kas	1.355.192.700	
b. Giro	10.107.171.148	
c. Tabungan (ABA)	<u>4.230.110.902</u>	

2. HUTANG LANCAR		28.385.177.669
a. Kewajiban Yang Segera Harus Dibayar (KSHD)	125.062.142	
b. Tabungan & Deposito	<u>28.260.115.527</u>	

Rasio

<u>15.692.474.751</u>	x	100%	=	
28.385.177.669				55,28%

TKS =

SEHAT

Ketentuan Bank Indonesia

- 5,00 % s/d 4,05 % = **Sehat**
- < 4,05 % s/d 3,30 % = **Cukup Sehat**
- < 3,30 % s/d 2,55 % = **Kurang Sehat**
- < 2,55 % s/d 0,00 % = **Tidak Sehat**

AKTIVA TERTIMBANG MENU RUT RESIKO (ATMR) & BMPK
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)

KETERANGAN	NOMINAL KREDIT	NOMINAL PPAP KHUSUS	NOMINAL	BOBOT	ATMR
ATMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. AKTIVA NERACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Kas.	0,00	0,00	1.355.192.700,00	0,00	0,00
1.2 Sertifikat Bank Indonesia (SBI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dannaabah disertai dengan surat kuasa pencairan,dan/atau logam mulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampau 1(satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	0,00	0,00	1.437.525.000,00	0,00	0,00
1.5 Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1.6 Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.	0,00	0,00	22.837.282.050,81	20,00	4.567.456.410,16
1.7 Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
a. Kredit kepada bank lain	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
b. Kredit kepada pemerintah daerah.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.8 Bagian dari kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.9 Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	14.216.607.870,00	553.343.660,00	13.663.264.210,00	30,00	4.098.979.263,00
1.10 Kredit kepada atau yg dijamin oleh BUMN/BUMD.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.11 Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1.12 Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.13 Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	1.799.815.000,00	91.038.000,00	1.708.777.000,00	50,00	854.388.500,00
1.14 Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	7.905.342.375,00	275.710.737,50	7.629.631.637,50	70,00	5.340.742.146,25
1.15 Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1.16 Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot resiko diatas.	9.062.835.425,00	589.334.109,00	8.473.501.316,00	100,00	8.473.501.316,00
1.17 Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau kualitas macet.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo.	1.760.743.375,00	156.411.687,50	1.604.331.687,50	100,00	1.604.331.687,50
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet.	13.660.710.266,00	8.401.224.016,00	5.259.486.250,00	100,00	5.259.486.250,00
1.18 Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	0,00	0,00	2.349.957.011,00	100,00	2.349.957.011,00
1.19 Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1(satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.20 Aktiva lainnya selain tersebut di atas.	0,00	0,00	337.887.777,00	100,00	337.887.777,00
JUMLAH	48.406.054.311,00	10.067.062.210,00	66.656.836.639,81		32.886.730.360,91

RASIO KECUKUPAN PEMENUHAN MODAL MINIMUM (KPMM)

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KETERANGAN	KOMPONEN	BOBOT	JUMLAH
MODAL	0,00	0 %	0,00
I. MODAL INTI	0,00	0 %	0,00
I.1 Modal Inti Utama	0,00	0 %	0,00
1.1.1 Modal disetor	40.808.164.387,00	100 %	40.808.164.387,00
1.1.2 Cadangan Tambahan Modal	0,00	0 %	0,00
1.1.2.1 Agio	0,00	100 %	0,00
1.1.2.2 Dana setoran modal	0,00	100 %	0,00
1.1.2.3 Modal sumbangan	0,00	100 %	0,00
1.1.2.4 Cadangan umum	5.090.631.692,52	100 %	5.090.631.692,52
1.1.2.5 Cadangan tujuan	0,00	100 %	0,00
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun - tahun lalu	-4.569.297.283,00	100 %	- 4.569.297.283,00
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi Kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP	-5.463.498.663,29	100 %	- 5.463.498.663,29
1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan	-5.463.498.663,29	0 %	0,00
1.1.2.7.2 Kekurangan pembentukan PPAP -/-	0,00	0 %	0,00
1.1.2.7.3 Taksiran utang PPh -/-	0,00	0 %	0,00
1.1.2.8 Pajak Tangguhan (deferred tax) -/-	0,00	100 %	0,00
1.1.2.9 Goodwill - / -	0,00	100 %	0,00
1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan	0,00	0 %	0,00
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-280.000.000,00	15%	- 42.000.000,00
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-1.157.525.000,00	50%	- 578.762.500,00
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	0,00	100 %	0,00
1.1.2.11 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya	0,00	0 %	0,00
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	0,00	50 %	0,00
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	0,00	100 %	0,00
Jumlah Modal Inti Utama	34.428.475.133,23	0 %	35.245.237.633,23
I.2 Modal Inti Tambahan	0,00	0 %	0,00
I.3 Jumlah Modal Inti (I.1+I.2)	34.428.475.133,23	0 %	35.245.237.633,23
II. MODAL PELENGKAP	0,00	0 %	0,00
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (maksimum 50% dari modal inti)	0,00	0 %	0,00
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap	0,00	0 %	0,00
II.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (maksimum 1,25% dari ATMR)	263.028.467,61	0 %	263.028.467,61
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	0,00	0 %	0,00
III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)	0,00	0 %	35.508.266.100,84
MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	0,00	0 %	3.946.407.643,31
SELISIH LEBIH MODAL	0,00	0 %	31.561.858.457,53

RASIO KPMM (CAR) =		
JUMLAH MODAL	35.508.266.100,84	
ATMR	32.886.730.360,91	107,97%